



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

LAKIP

**(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
TAHUN 2022**



**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi dalam kurun waktu tahun 2022 sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*),

Susunan Laporan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program /kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Pada Laporan Akuntabilitas (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon merupakan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program / kegiatan pada tahun 2020. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2020 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2020 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja di tahun 2023.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi sempurnanya penyusunan.

Sumber, 10 Februari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,


Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2022, merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan terhadap pertanggungjawaban Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dikaitkan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan, yang pelaksanaan program kegiatannya dilaksanakan selama 12 bulan, sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini suatu realisasi pelaksanaan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat dan terukur dalam rangka penyelenggaraan "good governance". Pada dasarnya, bahwa kinerja Dinas merupakan suatu action plan dalam rangka merealisasikan visi Dinas yang telah ditetapkan.

Dalam menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cirebon, telah berupaya untuk melaksanakan pembangunan sektor Perhubungan berdasarkan suatu strategi perencanaan yang sistematis yang dalam hal ini telah dirumuskan berbentuk Rencana Strategis (Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon (2020 – 2024) dengan Tujuan Pembangunan Perhubungan Kabupaten Cirebon dengan Program-program yang mendukung kinerja dalam jangka 5 (Lima) tahun (2019 – 2024), pada tahun 2022 program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan :

1. Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas dengan Indikator Kinerja Sasaran Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio).
2. Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Prosentase Jumlah Kendaraan Laik

Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji.

3. Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai dengan Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan.

Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan :

NON URUSAN :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN PERHUBUNGAN :

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang telah diperjanjikan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 telah tercapai, dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut:

NO	SASARAN INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu lintas	20,503,463,699.00	17,444,288,921.00	85.08	Lalu lintas Harian Rata-rata (LHR) Tahun 2022 mendapatkan Hasil tertinggi yaitu di ruas jalan Kanci - Sindanglaut : Volume 1320/kapasitas 2.668 = 0,78. Kategori level of service Kategori D, hasil ini menjadi dasar untuk rekomendasi perencanaan di tahun berikutnya untuk rencana penataan lalu lintas di ruas jalan Kanci - sindanglaut
	Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)	0.75 V/C	0.78 V/C	104	
2'	Meningkatnya Kendaraan yang Berkeselamatan	1,479,222.100.00	1,350,624.609.00	91.31	Dari target uji sebesar 83,24 pada tahun 2022, Dinas perhubungan telah merealisasikan wajib uji kendaraan sebanyak 95.04 persen. Angka ini di dapat dari 22.676 wajib uji Tahun
	Presentase Jumlah Kendaraan laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	83.24 Prosen	95.04 Prosen	114.18	

					2022 / 23.386 Angkutan Umum di Kab.Cirebon x 100% = 95.04%
3.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang Memadai	44,542,434.409.00	42,181,797,067.00	94.70	Survey IKM di Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2022
	Meningkatnya kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	75 Prosen	76.97 Prosen	102.63	

Demikian yang dapat Kami sampaikan dalam ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan pada tahun 2022, Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Terimakasih.

Sumber, Februari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,



Drs. H. ASDULLAH, M.M.

NIP. 19640203 199009 1 001

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Ringkasan eksekutif	ii
Daftar isi	iii
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Unit Kerja	1
B. Setruktur Organisasi	2
C. Tugas Pokok Dan Fungsi	2
D. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh	17
E. Sistematika Penulisan	17
Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
A. Visi Dan Misi	19
B. Tujuan	20
C. Sasaran Kinerja	21
D. Indikator Kinerja Utama (IKU)	22
E. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	24
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Kerangka Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja	25
B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja	26
C. Informasi Keuangan Terkait Pencapaian Sasaran	27
PENUTUP	46
Lampiran :	
1. IKU Perubahan Tahun 2022	
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022	
3. LRA Tahun 2022	
4. SPJ Fungsional Tahun 2022	
5. Rencana Aksi 2023	
6. RKT Dan Rencana Aksi Perubahan 2022	

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM UNIT KERJA

Birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan serta berhubungan langsung dengan masyarakat (public service), fungsi pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (development function), dan fungsi pemerintahan umum berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulation and function), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah mencakup pelayanan yang menghasilkan public good seperti jalan dan lain lain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi) seperti perizinan dan lain-lain.

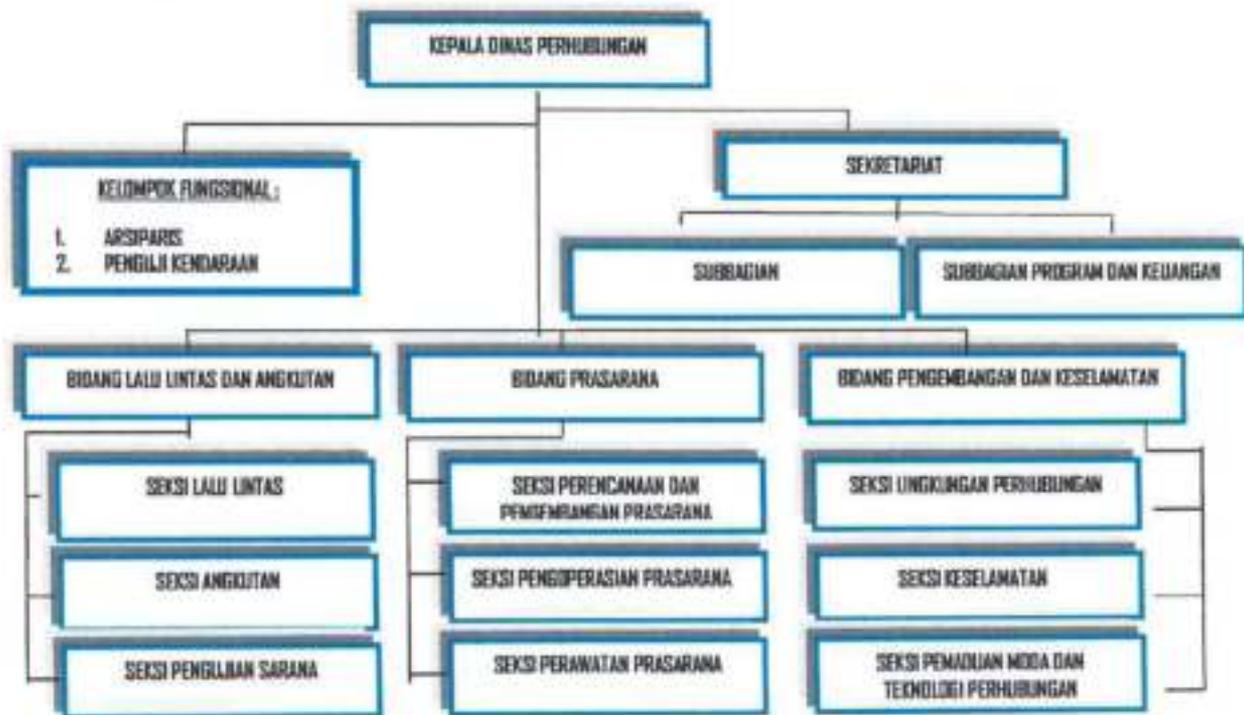
Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi pengelolaan keuangan negara. Tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab.

Hal ini diharapkan berdampak pada penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. SETRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon No 21 tahun 2021 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 35,Seri D) dengan Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab.Cirebon

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 tahun 2021 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 35,Seri D) dengan Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Perhubungan .

Adapun penjelasan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut :

I. KEPALA DINAS

- 1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- 3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Dinas Perhubungan;
 - b. perumusan kebijakan bidang perhubungan;
 - c. pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. pengelolaan prasarana perhubungan;
 - e. pelaksanaan pengembangan dan keselamatan perhubungan;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

I.1 SEKRETARIAT DINAS

- 1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat Dinas mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- 3) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Dinas;
 - b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan
 - e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
 - f. pengendalian pengelolaan Administrasi kepegawaian;
 - g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
 - h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;

- i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- j. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

I.2.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.
- 3) Subbagian Umum dan - Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
 - c. pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
 - d. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/operasional;
 - e. pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tanger meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
 - f. pengelolaan administrasi persuratan/dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/dokumen kedinasan,
 - g. pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan,
 - h. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
 - i. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;

- j. menyimpan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai,
- k. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai,
- l. pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai,
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

I.2.2 Subbagian Program dan Keuangan

- 1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Program dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- 2) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset.
- 3) Subbagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
 - d. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - e. pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
 - f. penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;

- g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
- i. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
- j. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- k. pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
- l. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- m. penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

I.2 BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

- 1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- 2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan lalu lintas dan angkutan.
- 3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan serta pengujian sarana;
 - c. penyelenggaraan pelayanan permohonan analisis dampak lalu lintas serta penataan lalu lintas perkotaan di kabupaten;
 - d. pelaksanaan pengelolaan angkutan darat, laut, sungai dan udara;
 - e. pengendalian pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
 - f. pengkajian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
 - g. pengendalian perencanaan pembangunan jaringan transportasi jalan;

- h. pengendalian analisa dampak lalu lintas sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

I.3.1 Seksi Lalu Lintas

- 1) Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi Lalu Lintas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
- 2) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan permohonan analisis dampak lalu lintas serta penataan lalu lintas perkotaan di kabupaten.
- 3) Seksi Lalu Lintas dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Lalu Lintas;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas;
 - c. pelaksanaan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
 - d. penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian untuk jaringan jalur kereta api kabupaten;
 - e. penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyebrangan dalam daerah kabupaten;
 - f. penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
 - g. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - h. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten;
 - i. penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
 - j. persetujuan hasil analisa dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
 - k. pelaksanaan manajemen dampak lalu lintas; 1. pendataan dan pemetaan informasi dampak lalu lintas;
 - l. pelaksanaan analisis perencanaan dampak lalu lintas;
 - m. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi Lalu Lintas; dan

- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

I.3.2 Seksi Angkutan

- 1) Seksi Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi Angkutan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
- 2) Seksi Angkutan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan angkutan darat, laut, sungai dan udara.
- 3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Angkutan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Angkutan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan;
 - c. pengendalian penyelenggaraan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten;
 - d. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - e. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - f. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;
 - g. penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - h. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten;
 - i. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus dan izin operasi;
 - j. penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah kabupaten;
 - k. pendataan dan pemetaan angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus;
 - l. pengolahan rekomendasi dan perpanjangan izin usaha angkutan dan izin trayek;

- m. pengawasan dan pendaftaran kendaraan bermotor untuk angkutan umum;
- n. pengelolaan retribusi tarif angkutan;
- o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Angkutan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

I.3.3 Seksi Pengujian Sarana

- 1) Seksi Pengujian Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi Pengujian Sarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
- 2) Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
- 3) Seksi Pengujian Sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pengujian Sarana;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan mensahkan hasil uji pengendalian serta pengawasan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengujian kendaran tidak bermotor;
 - e. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengujian berkala yang diselenggarakan oleh swasta;
 - f. pelaksanaan akreditasi dan spesifikasi pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh swasta;
 - g. pelaksanaan penilaian teknis kendaraan bermotor;
 - h. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan pengujian;
 - i. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
 - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengujian Sarana; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

I.3 BIDANG PRASARANA

- 1) Bidang Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- 2) Bidang Prasarana mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan pelaksanaan program kegiatan mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan prasarana perhubungan.
- 3) Bidang Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Prasarana;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana;
 - c. pengendalian pelaksanaan perencanaan dan pengembangan prasarana;
 - d. pengendalian pelaksanaan pengoperasian prasarana;
 - e. pengendalian pelaksanaan perawatan/ pemeliharaan prasarana;
 - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Prasarana; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

I.3.1 Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana

- 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana.
- 2) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan Dan pengembangan prasarana perhubungan.
- 3) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan prasarana;
 - c. pelaksanaan perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang berada di jalan dan bahu jalan;

- d. pelaksanaan pemberian izin/rekomendasi untuk pemasangan lampu penerangan jalan umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang akan di pasang secara swadaya oleh masyarakat;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi penerangan jalan umum yang tidak memiliki izin/rekomendasi;
- f. pelaksanaan investigasi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan penerangan jalan umum;
- g. penyiapan bahan-bahan kebutuhan kegiatan operasional penerangan jalan umum yang berkaitan dengan pemasangan dan pemeliharaan penerangan umum;
- h. penetapan rencan induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Kabupaten;
- i. pelaksanaan penetapan DLKR/DLKP bagi pelabuhan-pelabuhan regional;
- j. pelaksanaan pengelolaan pelabuhan laut dan infrastruktur penunjangnya;
- k. pelaksanaan teknis perencanaan pembangunan jaringan transportasi jalan;
- l. pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan antar pulau;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

I.3.2 Seksi Pengoperasian Prasarana

- 1) Seksi Pengoperasian Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana.
- 2) Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengoperasian prasarana meliputi pengelolaan perparkiran dan terminal.
- 3) Seksi Pengoperasian Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pengoperasian Prasarana;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengoperasian prasarana;
- c. pengelolaan data pengesahan rancang bangunan terminal dan sub terminal penumpang dan terminal barang;
- d. pendataan dan pemetaan lokasi serta pengoperasian terminal dan sub terminal penumpang dan terminal barang;
- e. pendataan jumlah wajib retribusi dan besarnya penerimaan retribusi terminal, serta administrasi retribusi;
- f. pengkajian permohonan izin pembangunan fasilitas parkir untuk umum di jalan daerah;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

I.3.3 Seksi Perawatan Prasarana

- 1) Seksi Perawatan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi Perawatan Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana.
- 2) Seksi Perawatan Prasarana mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perawatan rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan.
- 3) Kepala Seksi Perawatan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Perawatan Prasarana;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perawatan prasarana;
 - c. penentuan lokasi pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
 - d. pengadaan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan pendukung di jalan kabupaten;
 - e. pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;

- f. pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan fasilitas jaringan jalan dan gerakan lalu lintas;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perawatan Prasarana; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

I.4 BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN

- 1) Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- 2) Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan pengembangan dan keselamatan perhubungan.
- 3) Bidang Pengembangan dan Keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan keselamatan perhubungan;
 - c. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan pengembangan lingkungan perhubungan;
 - d. pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data secara sistematis dan obyektif penyebab kecelakaan transportasi;
 - e. pemberian dan penyampaian rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
 - f. pengembangan pemanduan moda dan teknologi perhubungan;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan. pelaksanaan. kegiatan Bidang Pengembangan dan Keselamatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

I.4.1 Seksi Lingkungan Perhubungan

- 1) Seksi Lingkungan Perhubungan dipimpin oleh Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.

- 2) Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan lingkungan perhubungan.
- 3) Seksi Lingkungan Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Lingkungan Perhubungan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan perhubungan;
 - c. pelaksanaan investigasi terhadap penyebab kecelakaan;
 - d. pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data secara sistematis dan obyektif penyebab kecelakaan transportasi;
 - e. permintaan data dan keterangan kepada instansi terkait, masyarakat atau pihak lain yang di pandang perlu;
 - f. penyusunan laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi;
 - g. pemberian dan penyampaian rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
 - h. pelaksanaan monitoring dan klarifikasi terhadap proses tindak lanjut atas rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
 - i. pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi secara independen, mandiri dan bertanggung jawab untuk menemukan penyebab terjadinya kecelakaan transportasi;
 - j. pemberian rekomendasi keselamatan transportasi yang dapat mendorong peningkatan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi yang handal;
 - k. pelaksanaan kerja sama investigasi kecelakaan transportasi dan peningkatan keterampilan dan keahlian SDM dengan berbagai pihak yang berkompeten serta melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana investigasi;
 - l. pelaksanaan dan/atau mengikuti sosialisai penyuluhan dan pertemuan ilmiah terkait upaya pencegahan dan/atau penanganan pertama terjadinya kecelakaan transportasi;
 - m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2 Seksi Keselamatan

- 1) Seksi Keselamatan dipimpin oleh Kepala Seksi Keselamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.
- 2) Seksi Keselamatan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan serta penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- 3) Seksi Keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Keselamatan;
 - b. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keselamatan;
 - c. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten;
 - d. pengawasan laik fungsi jalan;
 - e. pengelolaan keselamatan sarana dan prasarana;
 - f. fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten;
 - g. fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - h. pengelolaan keselamatan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
 - j. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan;
 - k. pelaksanaan pemeriksaan surat-surat perizinan kendaraan umum baik kendaraan barang maupun penumpang yang berupa kelengkapan buku KIR, Surat izin Bongkar Muat dan Trayek (Kartu Pengawasan);
 - l. pelaksanaan penilangan terhadap pelanggaran perundang-undangan lalu lintas dengan mengeluarkan berita acara penilangan;
 - m. pengawasan teknis pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan;
 - n. pengawasan jaringan lalu lintas angkutan barang dan angkutan khusus;
 - o. pelaksanaan penertiban umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang tidak memiliki izin/ rekomendasi;

- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Keselamatan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.4.3 Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

- 1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.
- 2) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan pelaksanaan perhubungan. mengendalikan pemaduan moda dan teknologi perhubungan.
- 3) Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengkajian di bidang perhubungan;
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan pengembangan pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan;
 - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 tahun 2021 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 35, Seri D) dengan Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Perhubungan terdiri dari 1 Sekretariat dan 3 Bidang yaitu Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Prasarana dan Bidang Pengembangan dan Keselamatan.

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, salah satu aspek strategis kewenangan tugas Dinas Perhubungan dijelaskan bahwa fungsi-fungsi seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas secara umum hanya dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Meskipun demikian dalam keadaan tertentu kewenangan tersebut dapat dilaksanakan di jalan namun harus berkoordinasi dan didampingi oleh petugas dari kepolisian.

Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun ke depan, untuk selalu menempatkan posisi organisasi pada kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya dan mampu menanggapi tuntutan lingkungan. Sehingga didalam perkembangan selanjutnya organisasi akan selalu tanggap menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang merupakan komponen RENSTRA perlu dirumuskan bersama untuk dijadikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. GAMBARAN UMUM UNIT KERJA
- B. SETRUKTUR ORGANISASI
- C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH
- E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. VISI DAN MISI
- B. TUJUAN
- C. SASARAN KINERJA
- D. IKU
- E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

B. PENGUKURAN DAN ANALISIS KINERJA

- Ringkasan Kinerja
- Rincian Kinerja

C. INFORMASI KEUANGAN TERKAIT PENCAPAIAN SASARAN

D. PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2022

E. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

A.1 VISI

Visi Bupati Cirebon :

**“ TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA,
AGAMIS, MAJU DAN AMAN ”.**

Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menetapkan Visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Selamat, Tertib, Lancar dan Terpadu guna meningkatkan perekonomian masyarakat ”

Definisi :

- Selamat** : *Terkandung makna bahwa dinas perhubungan sebagai dinas teknis yang menangani masalah perhubungan harus dapat memberikan pelayanan yang baik, terhadap transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat agar terhindar dari kecelakaan (terdapat didalam kegiatan pengujian kendaraan umum yang laik jalan).*
- Tertib** : *Terkandung makna sebagai dinas teknis yang memiliki kewenangan mengatur lalu lintas, berkewajiban untuk mengatur lalu lintas dalam bentuk pemenuhan rambu-rambu lalu lintas.*
- Lancar** : *Memiliki makna semua kegiatan transportasi dapat berjalan tanpa adanya hambatan atau terhindar dari macet.*
- Terpadu** : *Dimana kegiatan transportasi berjalan secara sinergi.*

A.2 MISI

Misi Bupati Cirebon :

“ Meningkatkan produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah”.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon mempunyai misi, yaitu :

1. Mewujudkan ketersediaan sarana dan Fasilitas perhubungan yang humanis ,memadai dan sesuai standar di Kabupaten Cirebon.
2. Mewujudkan pelayanan Perhubungan menuju keselamatan lalu lintas.

Untuk dapat merealisasikan misi yang telah ditetapkan, organisasi harus berinteraksi dengan lingkungannya,tanpa interaksi yang baik terhadap lingkungannya, organisasi akan menghadapi banyak tantangan dalam

pencapaian visi dan misinya.

Selain itu perlu dirumuskan *Critical Success Factors* (Faktor – faktor penentu keberhasilan) untuk mencapai sukses di masa mendatang dengan menggali potensi dari dalam Organisasi sendiri.

Adapun faktor – faktor penentu keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon meliputi :

1. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk mewujudkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBD, dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang profesional, baik aparat pelaksana terkait maupun mitra kerja.
2. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk mewujudkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBD, dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang profesional, baik aparat pelaksana terkait maupun mitra kerja.
3. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan baik struktural maupun fungsional, untuk menerapkan prinsip – prinsip koordinasi, intregasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

C. TUJUAN

Tujuan Bupati Kabupaten Cirebon :
" Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang beradilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan "
Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon :
" Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan "
Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon adalah Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan dengan tolak ukur Menurunya Angka Kecelakaan sehingga adanya peningkatan infrastruktur dasar kabupaten yang berkualitas untuk menurunkan tingkat Jumlah kecelakaan melibatkan angkutan umum / jumlah angkutan umum.
Tujuan merupakan target kualitas organisasi dan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan misi. Tujuan dimaksud untuk dicapai dalam waktu yang cukup panjang yaitu lebih dari satu tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Dengan pernyataan tujuan, organisasi

semakin jelas menentukan arah mana yang akan dituju dalam beberapa tahun mendatang. Sebagai penjabaran dari misi, tujuan bersifat lebih nyata dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dilihat dari sudut pandang management strategic, alasan utama keberadaan utama suatu organisasi adalah untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhan organisasi tersebut dalam kondisi lingkungan selalu berubah secara cepat.

Agar dapat mencapai tujuan tersebut, organisasi dituntut untuk meningkatkan kemampuannya, terutama kemampuan untuk berkompetisi. Kemampuan berkompetisi akan tumbuh dalam tubuh organisasi apabila terdapat rumusan tentang tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh organisasi tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa perumusan tujuan bukan hal yang terpisah dari perumusan visi dan misi organisasi.

Berdasarkan visi, misi dan faktor – faktor keberhasilan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan sebagai berikut

1. Tercapainya sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan dalam rangka keselamatan berlalu lintas.
2. Tercapainya sarana angkutan yang memadai dan selamat serta mampu mendukung peningkatan akselerasi pergerakan orang, barang, kesadaran, kepatuhan dan budaya keselamatan berlalu lintas.
3. Tercapainya sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan.

D. SASARAN KINERJA

Sasaran Bupati Cirebon :

- | | |
|----|--|
| 1. | Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah |
| 2. | Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik |
| 3. | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih |

Sasaran Dinas Perhubungan :

- | | |
|----|--|
| 1. | Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas |
| 2. | Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai |

Sasaran – sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon yang dirumuskan untuk masing – masing tujuan, beserta indikator kinerja bagi setiap sasaran pada tahun 2022 menjadi tolok ukur untuk Meningkatkan Kelancaran dan

Keselamatan Berlalu Lintas, Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan ,Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan guna untuk menurunkan jumlah kecelakaan, meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan menunjang kelancaran kegiatan dinas.

E. INDIKATOR KINERJA

E.1 Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan :

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas	Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)
2.	Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji
3.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan

E.2 Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan :

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
NON URUSAN		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan Prima
URUSAN PERHUBUNGAN		
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pelanggaran lalu lintas
		Persentase kendaraan wajib uji yang lulus uji
		Persentase kendaraan wajib uji yang lulus uji Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK

E.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah dokumen yang berisikan indikator kinerja pengukur pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon didapat dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, IKK dan penetapan kinerja yang disepakati antara Kepala SKPD Kabupaten Cirebon dan Bupati Cirebon. Besaran target untuk setiap indikator ditetapkan setiap tahunnya dalam Perubahan dokumen penetapan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2022, adalah :



**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2022**

1. Unit Organisasi : **DINAS PERHUBUNGAN**
2. Bidang Urusan : **Urusan Perhubungan**
3. Tugas Pokok :
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
 - Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang perhubungan.
 - Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan.
 - Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas.
 - Penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap Dinas Perhubungan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya

1. IKK/IKU SASARAN

N O	SASARAN INDIKATOR KINERJA	Indikator Sasaran	target
1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu lintas	Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)	0.75 VC
2'	Meningkatnya Kendaraan yang Berkeselamatan	Prosentase Jumlah Kendaraan laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	83.24 Prosen
3.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang Memadai	Meningkatnya kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	75 poin

F. RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2022

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
NO. SASARAN STRATEGIS : KESATU

SASARAN STRATEGIS													
Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berjalan lintas													
INDIKATOR KINERJA	Data Awal	TARGET											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(IKK/IKU) Rasio Volume per Kapasitas (VC Rasio)	0.75 VC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.73VC

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
NO. SASARAN STRATEGIS : KEDUA

SASARAN STRATEGIS													
Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan													
INDIKATOR KINERJA	Data Awal	TARGET											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(IKK/IKU) Presentase Jumlah Kendaraan Lalk Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	85.24 %	8.944	11.88	22.188	37.752	54.888	41.824	48.36	55.488	62.432	68.568	75.304	83.24

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
NO. SASARAN STRATEGIS : KETIGA

SASARAN STRATEGIS													
Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai													
INDIKATOR KINERJA	Data Awal	TARGET											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	75 Prosen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

Berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi serta sasaran pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2022.

Target, realisasi, Indikator Sasaran Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 adalah ;

NO	SASARAN INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berjalan Lintas	20,503,463,699.00	17,444,286,921.00	85.08	Lalu lintas Harian Rata-rata (LHR) Tahun 2022 mendapatkan Hasil tertinggi yaitu di ruas jalan Kanci - Sindanglaut : Volume 1320/kapasitas 2.668 = 0,78. Kategori level of service Kategori D, hasil ini menjadi dasar untuk rekomendasi perencanaan di tahun berikutnya untuk rencana penataan lalu lintas di ruas jalan Kanci - sindanglaut
	Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)	0.78 V/C	0.78 V/C	104	
2'	Meningkatnya Kendaraan yang Berkeselamatan	1,479,222,100.00	1,350,624,609.00	91.31	Dari target uji sebesar 83,24 pada tahun 2022, Dinas perhubungan telah merealisasikan wajib uji kendaraan sebanyak 95.04 persen. Angka ini di dapat dari 22.678 wajib uji Tahun 2022 / 23.858 Angkutan Umum di Kab.Cirebon x 100% = 95.04%
	Prosentase Jumlah Kendaraan laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	83.24 Prosen	95.04 Prosen	114.16	
3.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang Memadai	44,542,434,409.00	42,181,797,067.00	94.70	Survey IKM di Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2022
	Meningkatnya kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	75 Prosen	76.97 Prosen	102.63	

B. PENGUKURAN DAN ANALISIS KINERJA INDIKATOR SASARAN

1. Tercapai dan Tidak Tercapai Sasaran Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	TERCAPAI/ TIDAK TERCAPAI	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu lintas	20,503,463,699.00	17,444,288,621.00	85.08		Pelaksanaan Survey LHR tahun 2022 hanya mendata volume kendaraan dan Kapasitas jalan di 439 ruas jalan lokal desa di Kabupaten Cirebon. Nilai V/C rasio tertinggi/terpadat berada di jalur jalan sindanglaut kandi dengan Volume kendaraan sebanyak 1320/hari selama 8 jam survey, dan kapasitas jalan 2.668 M.
	Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)	0.75 V/C	0.78 V/C	104	Tidak Tercapai	Dalam penghitungan V/C rasio Dinas Perhubungan menggunakan Formula MKJI 1997 yaitu $V/C \times 100\%$. $1320/2.668 \times 100\% = 0.78$. dengan Level of service kategori D Dan V/C ratio terendah terdapat pada ruas jalan kenanga-kedungmuara dengan volume kendaraan sebanyak 13 dan Kapasitas jalan 1.445,36 dengan V/C rasio sebesar 0,01 dengan Level of service Kategori A
2	Meningkatnya Kendaraan yang Berkeselamatan	1,479,222,100.00	1,350,624,609.00	91.31		Dari Target 83,24 persen Dinas Perhubungan telah merealisasikan target wajib uji sebesar 95,04 persen sehingga melebihi target sebesar 11,80 persen. Dan capaian persentase kinerja sebesar 114,18 persen.
	Prosentase Jumlah Kendaraan laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	83,24 Prosen	95,04 Prosen	114,18	Tercapai Melampaui Target	
3.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang Memadai	44,542,434,409.00	42,181,797,067.00	94,70		Target IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dalam pelayanan di Pengujian Kendaraan Bermotor pada Tahun 2022 sebesar 75 point. Dinas Perhubungan telah melakukan Survey IKM di Pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor dengan hasil 76,97 Point.
	Meningkatnya kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	75 Prosen	76,97 Prosen	102,83	Tercapai Melampaui Target	

2. Analisa Ketercapaian Target Kinerja Keuangan dan Sasaran Kinerja

1. **Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu lintas**, dengan anggaran sebesar Rp. 20,503,463,699.00 terealisasi sebesar Rp. 17,444,288,921.00 atau 85,08%

Dengan sasaran indikator kinerja sebesar **0.75** Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio), Dinas Perhubungan telah merealisasikan ketercapaian kinerja sasaran sebesar **0,78** VC atau sebesar 104% sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon mengalami **Kegagalan dalam mencapai target sasaran kinerja**.

Ketidak ketercapaian pada sasaran kinerja ini disebabkan tidak dilaksanakannya sub kegiatan *Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota* yang menjadi sub kegiatan pengampu target kinerja pada sasaran ke 1 (satu) karena masih ada **efek pasca situasi pandemik Covid 19**.

Ada 3 tahapan untuk pencapaian target sasaran ini yaitu;

1. *Survey LHR (Lalu Lintas Harian Rata-rata);*
2. *Penataan Lalu Lintas*
3. *Uji coba Penataan Lalu Lintas*

Dinas Perhubungan perlu adanya Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota agar target V/C rasio terpenuhi, tentunya sudah melalui tahapan Survey lalu lintas dan Penataan Lalu Lintas.

2. **Meningkatnya Kendaraan yang Berkeselamatan**, dengan anggaran sebesar Rp. 1,479,222,100.00 terealisasi sebesar Rp. 1,350,624,609.00 atau 91,31%

Dengan sasaran indikator kinerja Prosentase Jumlah Kendaraan laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji sebesar **83.24** prosen, Dinas Perhubungan telah merealisasikan ketercapaian kinerja sasaran sebesar **95.04** prosen atau 114,18% sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon **mencapai target sasaran** yang telah ditentukan.

Sub kegiatan yang mendukung kinerja ini adalah Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

3. **Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang Memadai**, dengan anggaran sebesar Rp. 44,542,434,409.00 terealisasi sebesar Rp. 42,181,797,067.00

atau 94,70%

Dengan sasaran indikator Meningkatnya kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan sebesar 75 persen. Dinas Perhubungan telah merealisasikan ketercapaian kinerja sasaran sebesar 76,97 persen sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon *mencapai target sasaran* yang telah ditentukan.

Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dilaksanakan di Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan jumlah Responden sebanyak 80 orang.

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023
1	2	3	4	5		6
		VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN				
1.		MISI :MENINGKATNYA PRODUKTIFITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN OLEH KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH				
1.1.		Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan	Menurunya Angka Kecelakaan	205 Kecelakaan	205 Kecelakaan	200 Kecelakaan
1.1.1.		Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas	Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)	0.75 V/C	0.78 V/C	0.80
1.1.2		Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	83.24 Prosen	97.05 Prosen	83.44
1.1.3		Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	75 Poin	76.97 Poin	76 Poin

C. INFORMASI KEUANGAN TERKAIT PENCAPAIAN SASARAN

Dinas Perhubungan melaksanakan 2 program yaitu program Penunjang urusan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan.

Pelaksanaan kegiatan urusan yang melekat pada SKPD (operasional) pada Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan melalui Satu (1) Program, Tujuh (7) Kegiatan, dan Dua Puluh (20) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 44.542.434.409,-

dengan capaian realisasi sebesar Rp. 42.181.797.067 ,- (94.70%) dan sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp. 2.360.637.342,- (5.30%) yang merupakan sisa

Sementara itu Program Urusan Perhubungan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Perhubungan pada Tahun Anggaran 2022 didukung melalui satu (1) Program Kegiatan, dengan Sepuluh (10) Kegiatan, dan Dua Puluh Lima (25) Sub Kegiatan dengan ditunjang anggaran sebesar Rp. 21.982.685.799 ,- dengan terealisasi anggaran sebesar Rp. 18.794.913.530 ,- sisa sebesar Rp. 3.187.772.269,- atau tercapai sebesar 85.50%. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Belanja Operasional dan Modal Pemerintahan yang diselenggarakan pada Dinas Perhubungan terinci sebagaimana tabel berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2022	SISA ANGGARAN	PERSEN		
DINAS PERHUBUNGAN				Rp. 90.525.120.200	Rp. 60.870.716.987	Rp. 5.548.403.811	67,09%		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 60.280.000	Rp. 65.075.575	Rp. 204.505	99,69%
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 26.958.000	Rp. 26.958.000	Rp. -	100,00%
				3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 89.017.400	Rp. 58.325.895	Rp. 10.691.505	65,51%
		2	Administrasi Keuangan Daerah	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 8.483.298.000	Rp. 8.132.975.081	Rp. 352.623.719	95,84%
				5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 17.874.600	Rp. 17.874.600	Rp. -	100,00%
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	Rp. 98.782.000	Rp. 38.396.495	Rp. 1.335.505	38,84%
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7	Pengadaan Pelatan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 113.422.000	Rp. 121.904.229	Rp. 1.517.771	98,77%

	4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	Penyediaan Komponen Inisiasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	12.057.000	Rp	12.057.000	Rp	-	100,00%
			9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	106.182.520	Rp	92.159.830	Rp	16.002.690	85,20%
			10	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Rp	213.385.900	Rp	210.844.168	Rp	2.521.732	98,82%
			11	Penyediaan Bahan Binaan dan Perabuan Perundang-undangan	Rp	57.788.600	Rp	37.055.000	Rp	20.734.600	64,12%
			12	Penyediaan Bahan/Material	Rp	94.920.500	Rp	90.532.658	Rp	4.387.842	95,38%
			13	Facilitas Kunjungan Tamu	Rp	22.990.000	Rp	22.990.000	Rp	-	100,00%
			14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	134.790.500	Rp	134.790.500	Rp	-	100,00%
	5.	Pengadaan Barang Milik Daerah	15	Pengadaan Mebel	Rp	63.117.000	Rp	63.423.458	Rp	793.542	98,76%
	6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	34.375.781.104	Rp	32.456.362.459	Rp	1.919.388.645	94,42%
	7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	114.340.000	Rp	114.340.000	Rp	-	100,00%
			18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	41.585.000	Rp	16.408.200	Rp	25.186.800	39,45%
			19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	414.822.405	Rp	419.573.919	Rp	5.248.486	98,76%
			20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	49.750.000	Rp	49.750.000	Rp	-	100,00%

2.	PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	8.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	21	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kot a	Rp 149.878.700	Rp 142.687.200	Rp 1.191.500	99,17%
		9.	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	22	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kot a	Rp 1.270.288.760	Rp 1.239.916.458	Rp 30.370.302	97,61%
				23	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot a	Rp 22.486.453.959	Rp10.012.979.934	Rp 2.471.474.025	80,20%
				24	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Rp 1.305.562.580	Rp 1.020.245.190	Rp 185.317.390	84,63%
		10	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	25	Pengembang an Sarana dan Prasarana Terminal	Rp 299.601.400	Rp 294.092.400	Rp 5.509.000	98,16%
				26	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rp 196.999.800	Rp 196.662.738	Rp 3.337.062	98,33%
				27	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Rp 381.399.800	Rp 377.143.058	Rp 4.156.742	98,91%
		11.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	28	Fasilitas pemuahan Persetoran Perolehan Izin Penyelenggara an dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kot a dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp 2.004.770.000	Rp 1.808.233.190	Rp 196.536.810	90,20%
				29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggara an dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kot a	Rp 238.189.800	Rp 236.723.002	Rp 2.476.798	98,96%
		12.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	Rp 232.087.200	Rp 230.385.700	Rp 1.701.500	98,27%

				Bermotor					
			31	Registri Kendaran Wajib Uji Berkala Kendaran Bermotor	Rp 496.617.000	Rp 489.768.099	Rp 7.189.801	98,55%	
			32	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaran Bermotor	Rp 336.993.000	Rp 422.648.310	Rp 117.341.690	78,27%	
			33	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaran Bermotor	Rp 210.187.000	Rp 207.822.500	Rp 2.364.500	98,88%	
	13.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	34	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 370.872.600	Rp 370.872.600	Rp -	100,00%	
			35	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 102.352.600	Rp -	Rp 102.352.600	0,00%	
			36	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp 677.842.800	Rp 645.582.462	Rp 32.260.338	95,24%	
			37	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 74.437.300	Rp 74.437.300	Rp 1.000.000	98,67%	
	14	Peretujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	38	Penetapan Kebijakan Teba Kelca Andalalin	Rp 133.064.200	Rp 132.774.200	Rp 290.000	99,78%	
			39	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rp 241.293.200	Rp 237.049.750	Rp 4.243.450	98,24%	
	15.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	40	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaran Bermotor	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%	

			41	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Rp 45.240.000	Rp 44.740.000	Rp 300.000	99,33%
			42	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rp 46.952.000	Rp 46.952.000	Rp -	100,00%
	16	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	43	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 49.348.700	Rp 49.179.400	Rp 369.300	99,25%
			44	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp 422.402.100	Rp 422.410.299	Rp 10.191.861	97,64%
	17	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berbasis terintegrasi secara elektronik	Rp 49.393.000	Rp 49.343.600	Rp 250.000	99,50%
			46	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 42.784.300	Rp 42.264.200	Rp 7.527.600	84,88%

Dinas Perhubungan pada Tahun Anggaran 2022 menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai berikut:

1. Urusan yang Melekat pada Perangkat Daerah (Non Urusan)

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan urusan ini dalam rangka menunjang fungsi lini staf yang ada di Perangkat Daerah khususnya pada Sekretariat Dinas Perhubungan. Dalam rangka melaksanakan urusan ini, Dinas Perhubungan melaksanakan 1 (Satu) Program, 7 (Tujuh) Kegiatan dan 20 (Dua Puluh) Sub Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel diatas.

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota sebesar Rp.44.542.434.409 dan terealisasi sebesar Rp. 42.181.797.067 sisa sebesar Rp.2.360.637.342 atau tercapai sebesar 94,70%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 161.255.480 dan terealisasi sebesar Rp. 150.359.470 sisa sebesar Rp. 10.896.010

Output : Tersusunya Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Alokasi dana sebesar Rp. 65.280.080 dengan realisasinya Rp. 65.075.575 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 204.505 (Pencapaian input 99,69 %) Penyusunan Renstra, Perubahan Renstra, Renja, Perubahan Renja, PRA RKA, RKA, DPA, RKPA dan DPPA

Sub Output : Tersusunya Dokumen Perencanaan Sektoral Sebanyak 7 Dokumen

Out Come : Tersusun 7 Dokumen Perencanaan Sektoral dan tercapai 100%

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Alokasi dana sebesar Rp. 26.958.000 dengan realisasinya Rp. 26.958.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0

(Pencapaian input 100 %) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Sub Output : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 6 Dokumen

Out Come : 6 Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan tercapai 100%

c. **Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Alokasi dana sebesar Rp. 69.017.400 dengan realisasinya Rp. 58.325.895 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 10.691.505 (Pencapaian input 84,51 %) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan program dan kegiatan Dinas Perhubungan/simonek serta SPIP.

Sub Output : Terlaksananya Monev Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 3 kegiatan

Out Come : 3 Kegiatan Monev dan tercapai 100%

2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 8.543.205.400 dan terealisasi sebesar Rp. 8.189.246.176 sisa sebesar Rp. 353.959.224

Output : Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur

a. **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Alokasi dana sebesar Rp. 8.485.598.800 dengan realisasinya Rp. 8.132.975.081 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 352.623.719 (Pencapaian input 95,84 %) Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan.

Sub Output : Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan sebanyak 67 Pegawai

Out Come : 67 Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan dan tercapai 100%

b. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 17.874.600 dengan realisasinya Rp. 17.874.600. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) Terpenuhinya pelaporan realisasi kinerja dan keuangan dinas dan Aset.

Sub Output : Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Aset Sebanyak 1 Dokumen

Out Come : 1 Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Aset dan

tercapai 100%

- c. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**
Alokasi dana sebesar Rp. 39.732.000 dengan realisasinya Rp. 38.396.495. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 1.335.505 (Pencapaian input 96,64 %) Penyusunan Laporan Keuangan bulanan, triwulan, semesteran.
Sub Output : Tersusunnya Laporan Keuangan Periode Sebanyak 2 Laporan
Out Come : 2 Laporan Triwulanan dan Semesteran dan tercapai 100%
- 3 **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 123.422.000 dan terealisasi sebesar Rp. 121.904.229 sisa sebesar Rp. 1.517.771
Output : Pemenuhan Administrasi Kepegawaian
 - a. **Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**
Alokasi dana sebesar Rp. 123.422.000 dengan realisasinya Rp. 121.904.229 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 1.517.771 (Pencapaian input 98,77 %) Pemenuhan Pakaian Kerja Lapangan dan Pakaian Dinas sesuai SOP saat dinas lapangan berikut atribut ,Sepatu, Jaket dan Topi.
Sub Output : Terpenuhinya Pakaian Kerja Lapangan Pegawai sebanyak 5 jenis
Out Come : 5 jenis Pakaian Kerja Lapangan Pegawai dan tercapai 100%
 4. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 644.076.020 dan terealisasi sebesar Rp. 600.429.156 sisa sebesar Rp. 43.646.864
Output : Terpenuhinya Administrasi Umum Pendukung Kinerja Pegawai
 - a. **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**
Alokasi dana sebesar Rp. 12.057.000 dengan realisasinya Rp. 12.057.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan.
Sub Output : Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan sebanyak 7 jenis

Out Come : 7 jenis Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan dan tercapai 100%

b. **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Alokasi dana sebesar Rp. 108.162.520 dengan realisasinya Rp. 92.159.830 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 16.002.690 (Pencapaian input 85,20 %) Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan kerja.

Sub Output : Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 6 Jenis

Out Come : 6 Jenis Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan kantor dan tercapai 100%

c. **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Alokasi dana sebesar Rp. 213.365.900 dengan realisasinya Rp. 210.844.168 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 2.521.732 (Pencapaian input 98,82 %) Kebutuhan barang cetak dan penggandaan untuk menunjang kegiatan.

Sub Output : Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 13 Jenis

Out Come : 13 Jenis Barang Cetak dan Penggandaan dan tercapai 100%

d. **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.**

Alokasi dana sebesar Rp. 57.789.600 dengan realisasinya Rp. 37.055.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 20.734.600 (Pencapaian input 64,12 %) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan untuk menunjang Informasi dan kelancaran Kegiatan Dinas.

Sub Output : Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 8 jenis

Out Come : 8 jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan tercapai 100%

e. **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material**

Alokasi dana sebesar Rp. 94.920.500 dengan realisasinya Rp. 90.532.658 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 4.387.842 (Pencapaian input 95,38 %) Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk menunjang Kinerja.

Sub Output : Terpenuhinya Alat Tulis Kantor (ATK) sebanyak 40 Jenis

Out Come : 40 Jenis Alat Tulis Kantor (ATK) dan mencapai sebesar 100%

f. **Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu**

Alokasi dana sebesar Rp. 22.990.000 dengan realisasinya Rp. 22.990.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) Penyediaan makanan dan minuman kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan dinas.

Sub Output : Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat Dinas sebanyak 1463 orang

Out Come : 1637 orang Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat Dinas dan tercapai sebesar 111,89%

g. **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Alokasi dana sebesar Rp. 134.790.500 dengan realisasinya Rp. 134.790.500 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) Pemenuhan pembiayaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah untuk menunjang Kegiatan Dinas

Sub Output : Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sebanyak 250 kali

Out Come : 270 kali Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan tercapai 108 %

5. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 64.217.000 dan terealisasi sebesar Rp. 63.423.458 sisa sebesar Rp. 793.542

Output : Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Kinerja

a. **Sub Kegiatan Pengadaan Mebel**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 64.217.000 dengan realisasinya Rp. 63.423.458 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 793.542 (Pencapaian input 98,76 %) Pemenuhan meubelair dalam pelayanan publik.

Sub Output : Terpenuhinya Meubelair sebanyak 14 buah

Out Come : 14 buah Meubelair dan tercapai 108 %

6. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 34.375.751.104 dan terealisasi sebesar

Rp. 32.456.362.459 sisa sebesar Rp. 1.919.388.645

Output : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 34.375.751.104 dengan realisasinya Rp. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 1.919.388.645 (Pencapaian input 94,42 %) Pemenuhan Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik.

Sub Output : Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

a. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 34.375.751.104 dengan realisasinya Rp. 32.456.362.459 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 1.919.388.645 (Pencapaian input 94,42 %) Pemenuhan Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik.

Sub Output : Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik sebanyak 4 rekening

Out Come : 4 rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik dan tercapai 100 %

7. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 630.507.405 dan terealisasi sebesar Rp. 600.072.119 sisa sebesar Rp. 30.435.286

Output : Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Kinerja

a. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 114.340.000 dengan realisasinya Rp. 114.340.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) Dibutuhkan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional untuk menunjang kelancaran kegiatan Dinas.

Sub Output : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional sebanyak 16 unit

Out Come : 16 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dan tercapai 100%

b. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,**

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 41.595.000 dengan realisasinya Rp. 6.408.200 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 25.186.800 (Pencapaian input 39,45 %) Belanja pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (Belanja KIR Kendaraan dan STNK Roda 4 dan Roda 2.

Sub Output : Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Perizinan KIR dan STNK sebanyak 58 unit

Out Come : 45 unit Jasa Pemeliharaan, Perizinan KIR dan STNK dan tercapai 77,59%

c. **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 424.822.405 dengan realisasinya Rp. 419.573.919 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 5.248.486 (Pencapaian input 98,76 %) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor untuk menunjang Performen SKPD.

Sub Output : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor sebanyak 1 gedung

Out Come : 1 gedung terpelihara 100%

d. **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 49.750.000 dengan realisasinya Rp. 49.750.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub Output : Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebanyak 1 unit

Out Come : 1 unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan tercapai 100%

II **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (llaj) sebesar Rp. 21.982.685.799 dan terealisasi sebesar Rp. 18.794.913.530 sisa sebesar Rp.3.187.772.269 atau tercapai sebesar 85,50%. Program ini dilaksanakan melalui 10 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. **Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota sebesar Rp. 143.878.700 dan terealisasi sebesar Rp. 142.687.200 sisa sebesar Rp. 1.191.500

Output : Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten

a. **Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 143.878.700 dengan realisasinya Rp. 142.687.200 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 1.191.500 (Pencapaian input 99,17 %) Dibutuhkan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan di Wilayah Kabupaten Cirebon dan Inventarisasi Data Eksisting Perkembangan dan Perubahan Regular Analisis Dampak Lalu Lintas untuk penyusunan database andallalin.

Sub Output : Tersedianya Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan sebanyak 1 Dokumen

Out Come : 1 Dokumen Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dan tercapai 100%

2. **Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 14.960.323.299 dan terealisasi sebesar Rp. 12.273.141.582 sisa sebesar Rp. 2.687.181.717

Output : Terpasangnya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten

a. **Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 1.270.286.760 dengan realisasinya Rp. 1.239.916.458 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 30.370.302 (Pencapaian input 97,61 %) Peningkatan jumlah Pemenuhan Prasarana Jalan di Wilayah Kabupaten Cirebon.

Sub Output : Terpenuhinya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten sebanyak 10 unit (5083)

Outcome : Terpasangnya prasarana jalan sebanyak 10 unit (2972)

b. **Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 12.484.453.959 dengan realisasinya Rp. 10.012.979.934 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 2.471.474.025 (Pencapaian input 80,20 %) Peningkatan jumlah pemenuhan Penerangan Jalan Umum terpasang di Wilayah Kabupaten Cirebon.

Sub Output : Terpenuhinya Penerangan Jalan Umum sebanyak 4000 buah.

Outcome : Terpasangnya Penerangan Jalan Umum sebanyak 1170 buah.

c. **Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 1.205.582.580 dengan realisasinya Rp. 1.020.245.190 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 185.337.390 (Pencapaian input 84,63 %) Dibutuhkannya rehabilitasi ataupun pemeliharaan untuk menunggang prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik

Sub Output : Terpenuhinya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (PJU) sebanyak 3000 buah.

Outcome : Terpeliharanya PJU sebanyak 5321 buah

3. **Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C sebesar Rp. 499.601.200 dan terealisasi sebesar Rp. 490.755.138 sisa sebesar Rp. 8.846.062 atau sebesar 98,22%

a. **Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal**

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal sebesar Rp. 299.601.400 dan terealisasi sebesar Rp. 294.092.400 atau 98,16%

Output : Tersedianya halte bus, halte BRT, taxi sebanyak 3 lokasi

Outcome : Terbangunya 3 lokasi halte

b. **Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)**

Alokasi anggaran kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) sebesar Rp. 199.999.800 dan terealisasi sebesar Rp. 196.662.738 atau 98,33%

Output : Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) sebanyak 6 unit

Outcome : Pemeliharaan halte sebanyak 6 unit atau 100%

4. **Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir sebesar Rp. 2.243.969.800 dan terealisasi sebesar Rp. 2.044.956.192 sisa sebesar Rp. 199.013.608

Output : Terbangunya Taman Parkir dan Terpenuhinya Fasilitas

Perijinan Penyelenggaraan Parkir.

- a. **Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 2.004.770.000 dengan realisasinya Rp. 1.808.233.190 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 196.536.810 (Pencapaian input 90,20 %) Pemenuhan Taman Parkir dan Sistem Informasi Pengelolaan serta Penyelenggaraan Parkir secara Elektronik.

Sub Output : Terpenuhinya Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik senyak 1 kegiatan (Pembangunan 1 taman parkir)

Outcome : Terbangunya Fasilitas Parkir sebanyak 1 taman parkir.

- b. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 239.199.800 dengan realisasinya Rp. 236.723.002 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 2.476.798 (Pencapaian input 98,96 %) Penyelenggaraan Pengelolaan Perparkiran di kabupaten Cirebon.

Sub Output : Jumlah Petugas Parkir yang dibina sebanyak 580 petugas parkir.

Outcome : Terbinanya petugas parkir sebanyak 580 orang.

5. **Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar Rp.1.479.222.100 dan terealisasi sebesar Rp.

1.350.624.609 sisa sebesar Rp. 128.597.491

Output : Kendaraan Wajib Uji yang Memperoleh Smart Card / Sertifikat Pengujian

- a. **Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 232.087.200 dengan realisasinya Rp. 230.385.700 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 1.701.500 (Pencapaian input 99,27 %) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Gedung Pengujian.

Sub Output : Terbangunya Sarana dan Prasarana Pengujian Yang

Layak Fungsi sebanyak 4 paket

Outcome : Tersedianya 4 paket Sarana dan Prasarana Pengujian

b. **Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 496.957.900 dengan realisasinya Rp. 489.768.099 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 7.189.801 (Pencapaian input 98,55 %) Pelaksanaan Uji Kendaraan di Pengujian Kendaraan bermotor.

Sub Output : Terlaksanakannya Pengujian Kendaraan Bermotor sebanyak 30.240 wajib Uji

Outcome : Terujinya kendaraan wajib uji sebanyak 22.676 Kendaraan.

c. **Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 539.990.000 dengan realisasinya Rp. 422.648.310 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 117.341.690 (Pencapaian input 78,27 %) Kendaraan Wajib Uji yang Lolos Uji diberikan Bukti Lulus Uji dalam bentuk Smart Card.

Sub Output : Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dalam bentuk *Smart Card* sebanyak 18.000 SC

Outcome : Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dalam bentuk *Smart Card* sebanyak 14.900 SC

d. **Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 210.187.000 dengan realisasinya Rp. 207.822.500 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 2.364.500 (Pencapaian input 98,88 %) pelaksanaan kalibrasi dan pemeliharaan alat uji.

Sub Output : Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor sebanyak 9 alat uji.

Outcome : Terpeliharanya 9 alat uji.

6. **Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.226.505.300 dan terealisasi sebesar Rp. 1.090.892.362 sisa sebesar Rp. 135.612.938

Output : Jumlah Pelanggaran Angkutan Penumpang dan Barang dalam Berlalu Lintas

- a. **Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**
 Input : Alokasi dana sebesar Rp. 370.872.600 dengan realisasinya Rp. 370.872.600 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) Dibutuhkan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam Penataan jalan.
 Sub Output : Terlaksananya Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen
 Outcome : 1 dokumen Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- b. **Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**
 Input : Alokasi dana sebesar Rp. 102.352.600 dengan realisasinya Rp. 0 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 102.352.600 (Pencapaian input 0,00 %) Dalam Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dibutuhkan Uji Coba dan Sosialisasi.
 Sub Output : Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota sebanyak 1 kegiatan
 Outcome : Sub Kegiatan ini di tahun 2022 tidak dilaksanakan karena situasi pandemik Covid 19.
- c. **Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota**
 Input : Alokasi dana sebesar Rp. 677.842.800 dengan realisasinya Rp. 645.582.462 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 32.260.338 (Pencapaian input 95,24 %) Pentingnya kedisiplinan pengemudi dalam pengoperasian angkutan umum di jalan raya.
 Sub Output : Penindakan Pidana ringan lalu lintas dan angkutan jalan sebanyak 9 kegiatan
 Outcome : Terlaksanakannya 9 kegiatan PAM
- d. **Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota**
 Input : Alokasi dana sebesar Rp. 75.437.300 dengan realisasinya Rp. 74.437.300 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 1.000.000 (Pencapaian input 98,67 %) sinkronisasi pengelolaan lalu Lintas di Wilayah Kab. Cirebon.
 Sub Output : Terlaksananya forum lalu lintas dan angkutan jalan sebanyak 6 kegiatan

Outcome : Terselenggarakannya 6 kegiatan forum lalu lintas dan angkutan jalan.

7. **Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 374.357.400 dan terealisasi sebesar Rp. 369.823.950 sisa sebesar Rp. 4.533.450

Output : Jumlah Dokumen andalalin yang di setuju dan dilaksanakan dengan baik

a. **Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 133.064.200 dengan realisasinya Rp. 132.774.200 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 290.000 (Pencapaian input 99,78 %) Dibutuhkan Kajian kajian Penataan Lalu Lintas di Kabupaten Cirebon.

Sub Output : Tersedianya Dokumen Teknis Penataan Lalu Lintas di Kabupaten Cirebon sebanyak 1 dokumen

Outcome : 1 dokumen Teknis Penataan Lalu Lintas di Kabupaten Cirebon

b. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 241.293.200 dengan realisasinya Rp. 237.049.750 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 4.243.450 (Pencapaian input 98,24 %) Dalam Penilaian Andalalin dibutuhkan Koordinasi dan Sinkronisasi sebelum Penetapan Dokumen.

Sub Output : Terlaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Andalalin sebanyak 30 kegiatan

Outcome : 30 kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Andalalin

8 **Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan sebesar Rp. 91.992.000 dan terealisasi sebesar Rp.91.692.000 sisa sebesar Rp. 300.000

Output : Terlaksanakannya Audit dan Inspeksi Keselamatan

a. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 0 dengan realisasinya Rp. 0 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 0,00 %) Penanganan Keselamatan lalu lintas yang terintegrasi.

Sub Output : Terlaksananya inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Outcome : 0 kegiatan

- b. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 45.040.000 dengan realisasinya Rp. 44.740.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 300.000 (Pencapaian input 99,33 %) Adanya Pembinaan Sopir / Pengemudi Kendaraan Angkutan Penumpang.

Sub Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota sebanyak 4 kegiatan

Outcome : 4 kegiatan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota.

- c. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 46.952.000 dengan realisasinya Rp. 46.952.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) Amanat Permenhub 85 Tahun 2018 tentang SMK Perusahaan Angkutan Umum bahwa Pemerintah Daerah Melakukan Pembinaan Terhadap Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan

Perusahaan Angkutan Umum (SMK).

Sub Output : Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebanyak 6 kegiatan

Outcome : 6 kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

- 9 **Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 482.150.800 dan terealisasi sebesar Rp. 471.589.639 sisa sebesar Rp. 10.561.161

Output : Pemenuhan Pelayanan Perijinan dalam Penyelenggaraan Angkutan

- a. **Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 49.548.700 dengan realisasinya Rp. 49.179.400 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 369.300 (Pencapaian input 99,25 %) Pemenuhan data base perijinan trayek berbasis IT.

Sub Output : Tersedianya Sistem Pelayanan Pelayanan Jasa Angkutan sebanyak 1 sistem aplikasi

Outcome : 1 sistem aplikasi Pelayanan Pelayanan Jasa Angkutan

b. **Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 432.602.100 dengan realisasinya Rp. 422.410.239 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 10.191.861 (Pencapaian input 97,64 %) Adanya Pengendalian dan Pengawasan terhadap Ijin Trayek yang telah di keluarkan.

Sub Output : Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Ijin Trayek sebanyak 1 kegiatan

Outcome : 1 kegiatan Koordinasi dan Monitoring Ijin Trayek.

10 **Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 99.385.400 dan terealisasi sebesar Rp. 91.607.800 sisa sebesar Rp. 7.777.600.-

Output : Tersedianya Dokumen Penerbitan Penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek Lintas daerah

a. **Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 49.593.600 dengan realisasinya Rp. 49.343.600 Dengandemikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 250.000 (Pencapaian input 99,50 %) Pemenuhan Sistem Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Umum Lintas Daerah Berbasis Elektronik.

Sub Output : Terpenuhinya Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang Trayek Lintas Daerah secara elektronik sebanyak 1 dokumen.

Outcome : 1 dokumen Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang Trayek Lintas Daerah secara elektronik

b. **Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 49.791.800 dengan realisasinya Rp. 42.264.200 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 7.527.600 (Pencapaian input 84,88 %) Pengendalian Ijin Penyelenggaraan Angkutan dengan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan.

Sub Output : Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek sebanyak 1 dokumen

Outcome : 1 dokumen Pengendalian Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek.

D. Perbandingan Pencapaian Target Tahun 2021 dengan Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Target Tahun 2021	Realisasi Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Target Tahun 2022		
DINAS PERHUBUNGAN									
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	5 dok	7 dok	7 dok
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 dok	8 dok	6 dok	6 dok
				3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dok	7 dok	3 keg	3 keg
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	Penyediaan Gej dan Tunjangan ASH	66 Peg	66 Peg	67 Peg	67 Peg
				5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

			6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	0	0	2 dok	2 dok	
		3.	Administrasi Kepogawesan Perangkat Daerah	7	Pengadaan Paksiin Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 jenis	2 jenis	5 jenis	5 jenis
		4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis	8 jenis	7 jenis	7 jenis
				9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 jenis	10 jenis	6 jenis	6 jenis
				10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13 jenis	13 jenis	15 jenis	13 jenis
				11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penerbitan Perundang-undangan	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis
				12	Penyediaan Bahan/Material	42 jenis	42 jenis	40 jenis	40 jenis
				13	Fasilitas Kunjungan Tamu	1900 Orang	463 Orang	1463,Orang	1637 orang
				14	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 kali	223 kali	250 kali	270 kali
		5.	Pengadaan Barang Milik Daerah	15	Pengadaan Mebel	0	0	14 buah	14 buah
				16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	0	0
				17	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 gedung	1 gedung	0	0
		6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 rek	4 rek	4 rek	4 rek
		7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16 unit	16 unit	16 unit	16 unit

				20.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74 Unit	38 unit	58 unit	45 unit
				21.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung
				22.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34 prosen	68 prosen	1 unit	1 unit
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	8.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kot	23.	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kot	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
				24.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kot	1 dok	1 dok	0	0
		9.	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot	25.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kot	2366 unit	1494 unit	10 unit	10 unit
				26.	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot	1200 buah	693 buah	4000 buah	1170 buah
				27.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	4 halte	4 halte	3000 buah	5321 buah
		10.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	28.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	4 halte	4 halte	3 lokasi	3 lokasi
				29.	Pembangunan Gedung Terminal	1 terminal	1 terminal	0	0
				30.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	0	0	6 unit	6 unit
				31.	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	3 terminal	3 terminal	30 orang	30 orang

		11.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	32	Faciliasi penerbitan Peryaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	0	0	1 keg	1 keg
				33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	450 orang	450 orang	580 orang	580 orang
		12.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	34	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 gedung	1 gedung	4 paket	4 paket
				35	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	17541 Wajib uji	23211 Wajib uji	30.240 Wajib uji	22.676 Wajib uji
				36	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	0,80	18.000 Smartcard	14.900 Smartcard
				37	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9 alat uji	9 alat uji	9 alat uji	9 alat uji
		13.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lelu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	38	Perataan Manajemen dan Rekayasa Lelu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	0	1 dok	1 dok
				39	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lelu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	0	1 keg	0 keg
				40	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1	0,80	9 keg	9 keg

			41	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	0	0	6 keg	6 keg
	14	Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	42	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	2 dok	2 dok	1 dok	1 dok
			43	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4 keg	3,30 keg	30 keg	30 keg
	15	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	44	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	12 keg	12 keg
			45	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggara dan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	0	0	4 keg	4 keg
			46	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0	0	6 keg	6 keg
	16	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	47	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	1 sistem Aplikasi	1 sistem Aplikasi
			48	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 dok	2 dok	1 keg	1 keg

	17	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49	Fasilitasi penenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	0	0	1 dok	1 dok
	18	Penetapan Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 daerah kabupaten/kota	50	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	1 dok	1 dok
			51	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	9 kegiatan	9 kegiatan	0	0

E. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

a. FAKTOR PENDORONG

1. Koordinasi yang baik antar unit kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon antara sekretariat dan Bidang- bidang yang ada di Dinas Perhubungan untuk melaksanakan program dan Kegiatan yang telah di tetapkan bersama
2. Dinas Perhubungan selalu mengevaluasi dan memonitor kinerja setiap bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan
3. Semangat kerjasama antar unit untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan

b. FAKTOR PENGHAMBAT

1. Perubahan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Teknik pengelolaan keuangan daerah dengan diterapkannya aplikasi baru sehingga pelaksanaan program dan kegiatan harus disesuaikan.
2. Efek situasi dan kondisi pasca pandemik Covid 19 yang masih berkelanjutan sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan.
3. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana yang tersedia.

c. RENCANA TINDAK LANJUT

Evaluasi hasil kinerja pada Tahun 2022 akan menjadi acuan Dinas Perhubungan untuk mencapai target yang telah ditentukan dan akan menjadi dasar bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023. Adapun rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023, akan dilaksanakan sesuai dengan sasaran indikator, Anggaran dan Target yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menyajikan pencapaian dari sasaran yang tercermin pada capaian indikator kinerja dari 3 sasaran kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Pada tahun 2022 Dinas Perhubungan dalam pencapaian sasaran kinerja menemukan adanya kendala dalam pencapaian sasaran kinerja yang ke 1 (satu) yaitu : **Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu lintas**, Dengan sasaran indikator kinerja sebesar **0.75** Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio), Dinas Perhubungan telah merealisasikan ketercapaian kinerja sasaran sebesar **0,78** VC atau sebesar 104% sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon mengalami **Kegagalan dalam mencapai target sasaran kinerja**. Ketidak tercapaian pada sasaran kinerja ini disebabkan tidak dilaksanakannya sub kegiatan *Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota* yang menjadi sub kegiatan pengampu target kinerja pada sasaran ke 1 (satu) karena masih ada **efek pasca situasi pandemik Covid 19**. Dinas Perhubungan perlu adanya Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota agar target V/C rasio terpenuhi, tentunya sudah melalui tahapan Survey lalu lintas dan Penataan Lalu Lintas.

Sasaran kinerja yang ke 2 (Dua) yaitu : **Meningkatnya Kendaraan yang Berkeselamatan**,

Dengan sasaran indikator kinerja Prosentase Jumlah Kendaraan laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji sebesar **83.24** persen, Dinas Perhubungan telah merealisasikan ketercapaian kinerja sasaran sebesar **95.04** persen atau 114,18% sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon **mencapai target sasaran** yang telah ditentukan.

Sasaran kinerja yang ke 3 (Tiga) yaitu ; **Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang Memadai**, Dengan sasaran indikator Meningkatkan kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan sebesar **75** persen. Dinas Perhubungan telah merealisasikan ketercapaian kinerja sasaran sebesar **76,97** persen sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon **mencapai target sasaran** yang telah ditentukan. Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dilaksanakan di Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan jumlah Responden sebanyak 80 orang.

Keberhasilan yang dicapai pada tahun 2022 antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan yang bersama-sama melakukan upaya peningkatan capaian akuntabilitas kinerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon pada hakekatnya adalah berkat rahmat serta karunia Allah SWT, tetapi sangat disadari bahwa dengan keterbatasan yang dalam pelaksanaannya belum optimal sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian permasalahan dan kegagalan yang dihadapi agar jadi pemicu prestasi dan perbaikan kinerja kedepannya sehingga tidak menjadi penghambat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada pada umumnya, Sehingga Dinas perhubungan **merekomendasikan** agar kegiatan dan Sub kegiatan pengampu capaian target kinerja agar didukung keberadaannya dan ditingkatkan kebutuhan jumlah pagu anggaran agar peningkatan kinerja dapat tercapai sebagaimana yang telah disepakati.

Selanjutnya Dinas Perhubungan akan menindaklanjuti dengan Perencanaan yang lebih baik untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun kedepannya yang merupakan skala prioritas dan pengampu capaian kinerja sasaran Kepala Dinas Perhubungan guna merealisasikan capaian sasaran Dinas perhubungan sebagai dukungan keberhasilan Visi dan Misi Bupati Cirebon.

Permasalahan pada tahun 2022 dijadikan sebagai catatan untuk selanjutnya dapat dijadikan tolok ukur dalam peningkatan kinerja aparatur Dinas Perhubungan khususnya serta meningkatkan kualitas dan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang akan datang.

Sumber, Februari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001



**(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
TAHUN 2022**

LAMPIRAN

**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023**

Tabel 3
IKU, Anggaran dan Target Kinerja Perubahan Tahun 2022
Dinas Perhubungan

No	Kode	SASARAN KINERJA	IKU/IKU SASARAN TAHUN 2022	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2022	PAGU ANGGARAN SEBUDAH PERUBAHAN TAHUN 2022	TARGET SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2022	TARGET SESUDAH PERUBAHAN TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)			(4)		
1	1.1.1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas	(IKU/IKU)-Rasio Volume per Kapasitas (VIC Rasio)	Rp 18.500.835.940	RP. 20.503.453.696,00	0,75 VIC	0,75 VIC
2	1.1.2.	Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	(IKU/IKU)-Prosentase Jumlah Kendaraan Laki Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	Rp 1.424.130.700	RP. 1.479.222.100,00	83,24 Prosen	83,24 Prosen
3	1.1.3.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	Rp 43.319.008.347	Rp. 44.542.434.406,00	75 Poin	75 Poin
JUMLAH TOTAL ANGGARAN				Rp 63.343.974.987	Rp. 66.525.120.208,00		

Sumber, Oktober 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON



Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERHUBUNGAN**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. ASDULLAH, M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. IMRON, M.ag.
Jabatan : BUPATI CIREBON

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

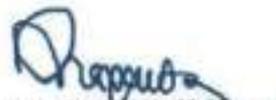
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,

Drs. H. IMRON, M.ag.


Drs. H. ASDULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan				Sumber Data		Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target	(7)	(8)	(9)		
1.1.	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1.1.01.	Meningkatkan Secara Transportasi yang berkeselamatan	Merutunya Angka Kecelakaan	Jumlah kecelakaan meloadak angkutan umum / jumlah angkutan umum	Non Kumulatif	Menurun	Dinas Perhubungan	200 Kecelakaan	200 Kecelakaan		
1.1.01.	Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Berjalan Lintas	Meningkatnya prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Ratio) < 0.75	ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Ratio) < 0.75 dibagi jumlah ruang jalan yang disurvei	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	75 Prosen	75 Prosen		
1.1.02.	Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	Presensi Jumlah Kendaraan Laki Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uj	Jumlah angkutan umum yang lulus uji dibagi jumlah angkutan umum di kabupaten Cirebon	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	83.24 Prosen	83.24 Prosen		
1.1.03.	Meningkatnya Pelayanan Perhentoran yang memadai	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.	Sangat Baik : 81.26 - 100 Baik : 62.51 - 81.25 Kurang Baik : 43.76 - 62.50 Tidak Baik : 25.00 - 43.75	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	75 Poin	75 Poin		

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)	18.545.744.540,00	20.503.463.689,00	Sumber Dana: DTU-DAU,DTU-DALU, Pjk Pen Jln
1.1.02.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)	1.424.130.700,00	1.479.222.100,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	43.319.008.347,00	44.542.434.809,00	Sumber Dana: DTU-DAU,DTU-DALU, DTU-DBH, Pjk Pen Jln,DTU-DAU, Pjk Pen Jln,Pjk Pen Jln
	J U M L A H	63.288.883.587,00	66.525.120.208,00	

Sumber, Oktober 2022
Pihak Kesatu
Kepala Dinas Perhubungan,



Drs. H. ASDULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

Pihak Kedua
BUPATI CIREBON,



Drs. H. JINRON, M.Si.

**RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
NO. SASARAN STRATEGIS : KESATU

SASARAN STRATEGIS												
Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berjalan Lintas												
INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SESUDAH PERUBAHAN	TARGET									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
(KORUJ-Basis Volume per Kapasitas (MC Rasio)	0,75 VC	0,75 VC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75%

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
NO. SASARAN STRATEGIS : KEBUA

SASARAN STRATEGIS												
Meningkatnya kenyamanan yang berkeselamatan												
INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SESUDAH PERUBAHAN	TARGET									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
(KORUJ-Proporsi Jumlah Kendaraan Lintas Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Jalur Uj)	83,24%	83,24%	83,08,00	83,11,00	83,13,00	83,14,00	83,16,00	83,17,00	83,19,00	83,21,00	83,22,00	83,24,00

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
NO. SASARAN STRATEGIS : KETIGA

SASARAN STRATEGIS												
Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai												
INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SESUDAH PERUBAHAN	TARGET									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Meningkatnya Kinerja dan Kecepatan Dinas Perhubungan	75 Poin	75 Poin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 poin

Sumber, Februari 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



Drs. H. ABDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 196005 1 001

BENCANA AKSI KORBAN PERUSAHAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR DAFTAR PERUSAHAAN
MUSKABANG 2022

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	KETERANGAN	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MAY		JUN		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER	
				NO	DAFTAR	NO	DAFTAR	NO	DAFTAR	NO	DAFTAR	NO	DAFTAR	NO	DAFTAR	NO	DAFTAR	NO	DAFTAR	NO	DAFTAR	NO	DAFTAR	NO	DAFTAR	NO	DAFTAR
1	PT. BUKIT BARU	1	1000000	1	1000000	1	1000000	1	1000000	1	1000000	1	1000000	1	1000000	1	1000000	1	1000000	1	1000000	1	1000000	1	1000000
2	PT. BUKIT BARU	2	2000000	2	2000000	2	2000000	2	2000000	2	2000000	2	2000000	2	2000000	2	2000000	2	2000000	2	2000000	2	2000000	2	2000000
3	PT. BUKIT BARU	3	3000000	3	3000000	3	3000000	3	3000000	3	3000000	3	3000000	3	3000000	3	3000000	3	3000000	3	3000000	3	3000000	3	3000000
4	PT. BUKIT BARU	4	4000000	4	4000000	4	4000000	4	4000000	4	4000000	4	4000000	4	4000000	4	4000000	4	4000000	4	4000000	4	4000000	4	4000000
5	PT. BUKIT BARU	5	5000000	5	5000000	5	5000000	5	5000000	5	5000000	5	5000000	5	5000000	5	5000000	5	5000000	5	5000000	5	5000000	5	5000000
6	PT. BUKIT BARU	6	6000000	6	6000000	6	6000000	6	6000000	6	6000000	6	6000000	6	6000000	6	6000000	6	6000000	6	6000000	6	6000000	6	6000000
7	PT. BUKIT BARU	7	7000000	7	7000000	7	7000000	7	7000000	7	7000000	7	7000000	7	7000000	7	7000000	7	7000000	7	7000000	7	7000000	7	7000000
8	PT. BUKIT BARU	8	8000000	8	8000000	8	8000000	8	8000000	8	8000000	8	8000000	8	8000000	8	8000000	8	8000000	8	8000000	8	8000000	8	8000000
9	PT. BUKIT BARU	9	9000000	9	9000000	9	9000000	9	9000000	9	9000000	9	9000000	9	9000000	9	9000000	9	9000000	9	9000000	9	9000000	9	9000000
10	PT. BUKIT BARU	10	10000000	10	10000000	10	10000000	10	10000000	10	10000000	10	10000000	10	10000000	10	10000000	10	10000000	10	10000000	10	10000000	10	10000000



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2022 dan 2021

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.807.976.000,00	2.634.459.300,00	93,82	2.410.647.500,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.807.976.000,00	2.634.459.300,00	93,82	2.410.647.500,00
4.1.03.	Retribusi Daerah	2.807.976.000,00	2.634.459.300,00	93,82	2.410.647.500,00
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	2.723.250.000,00	2.549.979.300,00	93,64	2.307.381.500,00
4.1.02.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	427.000.000,00	579.458.000,00	135,70	303.554.000,00
4.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	427.000.000,00	579.458.000,00	135,70	303.554.000,00
4.1.02.01.06.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.296.250.000,00	1.970.521.300,00	85,81	2.063.837.300,00
4.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.296.250.000,00	1.970.521.300,00	85,81	2.063.837.300,00
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	84.720.000,00	84.480.000,00	99,72	103.256.000,00
4.1.02.02.04.	Retribusi Terminal	84.720.000,00	84.480.000,00	99,72	103.256.000,00
4.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	84.720.000,00	84.480.000,00	99,72	103.256.000,00
5.	BELANJA DAERAH	66.525.120.286,00	60.976.710.597,00	91,64	52.471.520.250,00
5.1.	BELANJA OPERASI	51.290.184.969,00	48.403.797.259,00	94,37	42.969.668.296,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	8.540.157.773,00	8.155.794.107,00	95,41	7.422.080.046,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.253.474.605,00	4.122.336.382,00	96,92	3.850.747.922,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.979.367.000,00	2.931.351.100,00	98,39	2.799.820.918,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.979.367.000,00	2.931.351.100,00	98,39	2.799.820.918,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	343.992.000,00	337.763.930,00	98,19	341.808.614,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	343.992.000,00	337.763.930,00	98,19	341.808.614,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	162.750.000,00	153.030.000,00	94,03	166.640.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	162.750.000,00	153.030.000,00	94,03	166.640.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	88.536.000,00	48.130.000,00	54,31	39.120.000,00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	88.536.000,00	48.130.000,00	54,31	39.120.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	105.020.000,00	104.740.000,00	99,73	84.600.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	105.020.000,00	104.740.000,00	99,73	84.600.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	203.169.000,00	199.806.780,00	98,35	203.427.780,00
5.1.01.01.06.0003.	Belanja Tunjangan Beras PNS	203.169.000,00	199.806.780,00	98,35	203.427.780,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	221.259.800,00	199.310.889,00	90,08	2.745.457,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	221.259.800,00	199.310.889,00	90,08	2.745.457,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	42.000,00	40.304,00	95,96	38.209,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	42.000,00	40.304,00	95,96	38.209,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	124.793.000,00	123.805.502,00	99,57	187.895.143,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	124.793.000,00	123.805.502,00	99,57	187.895.143,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.137.000,00	6.034.441,00	98,33	5.732.970,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.137.000,00	6.034.441,00	98,33	5.732.970,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	18.409.000,00	18.103.436,00	98,34	17.138.831,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.409.000,00	18.103.436,00	98,34	17.138.831,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.091.650.500,00	3.935.922.142,00	96,17	3.439.577.000,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.807.640.000,00	1.489.060.000,00	82,37	1.439.577.000,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.807.640.000,00	1.489.060.000,00	82,37	1.439.577.000,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	677.430.000,00	650.990.000,00	96,10	0,00
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	677.430.000,00	650.990.000,00	96,10	0,00
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.906.580.000,00	1.775.872.142,00	93,14	0,00
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.906.580.000,00	1.775.872.142,00	93,14	0,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	179.115.612,00	97.008.123,00	54,16	109.158.233,00
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	62.790.813,00	62.008.123,00	98,91	95.508.233,00
5.1.01.03.02.0004.	Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	13.350.381,00	5.468.134,00	40,87	6.058.442,00
5.1.01.03.02.0006.	Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	76.440.105,00	54.582.169,00	71,30	66.518.787,00
5.1.01.03.02.0017.	Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi jasa Usaha-Terminal	2.951.126,00	2.096.820,00	71,05	2.931.064,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	86.385.000,00	25.850.000,00	29,93	33.650.000,00
5.1.01.03.07.0003.	Belanja Honorarium Pengabdian Masyarakat	86.385.000,00	25.850.000,00	29,93	33.650.000,00
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDU/WKDU	23.917.563,00	19.536.460,00	81,68	23.396.891,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.01.05.11.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	23.917.563,00	19.536.480,00	81,48	23.394.881,00
5.1.01.05.11.0004.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.572.049,00	2.572.049,00	100,00	2.536.002,00
5.1.01.05.11.0009.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor	20.409.840,00	16.360.761,00	80,15	19.955.636,00
5.1.01.05.11.0017.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Taminal	935.674,00	603.670,00	64,51	805.243,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	42.743.947.194,00	40.248.093.152,00	94,17	35.546.786.250,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	3.933.685.565,00	3.572.800.587,00	90,83	3.554.891.395,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Mabis	3.933.291.365,00	3.572.406.387,00	90,82	3.554.891.395,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	30.199.260,00	30.199.260,00	100,00	23.055.900,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.190.406.960,00	1.043.533.039,20	87,66	298.180.480,00
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	440.079.000,00	437.851.150,00	99,48	345.131.105,00
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-bi Tabung Pemadam Kebakaran	1.784.400,00	1.784.400,00	100,00	2.871.900,00
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-bi Tabung Gas	1.971.095,00	814.500,00	41,32	0,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	46.567.300,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Angkutan	118.095.200,00	118.095.200,00	100,00	54.341.480,00
5.1.02.01.01.0018.	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	5.900.430,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	927.408.400,00	800.944.577,00	86,36	330.588.700,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	70.218.100,00	69.444.059,00	98,90	86.756.000,00
5.1.02.01.01.0028.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.902.600,00	0,00	0,00	716.828.020,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Denda Pos	4.750.000,00	3.000.000,00	63,16	4.500.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	114.354.200,00	113.716.000,00	99,44	3.971.200,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	69.713.730,00	69.713.730,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	436.836.600,00	367.825.080,00	84,20	328.076.030,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	233.000.000,00	233.511.057,00	99,76	156.523.500,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	728.000,00	721.500,00	98,91	0,00
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.652.825,00	3.652.825,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	151.018.000,00	146.370.000,00	96,93	86.638.000,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman jamuan Tamu	12.100.000,00	12.100.000,00	100,00	4.750.800,00
5.1.02.01.01.0054.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	102.480.000,00	99.520.000,00	96,14	69.270.000,00
5.1.02.01.01.0068.	Belanja Pakan Sapi	23.100.000,00	23.100.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Mabis Pakal	394.200,00	394.200,00	100,00	0,00
5.1.02.01.02.0012.	Belanja Rpa-Rpa Plastik PVC (UPVC)	394.200,00	394.200,00	100,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	27.753.696.129,00	25.621.579.127,00	92,35	32.343.383.917,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	36.952.917.704,00	34.956.471.138,00	94,60	31.249.662.448,00
5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	132.805.300,00	123.305.090,00	92,85	53.613.290,00
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Perancangan Prasarana dan Sarana Umum	223.200.000,00	223.200.000,00	100,00	176.760.000,00
5.1.02.02.01.0022.	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	500.400.000,00	500.400.000,00	100,00	572.450.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	344.480.000,00	342.050.000,00	99,55	498.150.000,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	223.200.000,00	223.200.000,00	100,00	217.800.000,00
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	17.400.000,00	17.400.000,00	100,00	17.400.000,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	17.400.000,00	17.400.000,00	100,00	17.400.000,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan	205.870.000,00	188.480.000,00	91,54	85.260.000,00
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga SAP	17.400.000,00	17.400.000,00	100,00	17.400.000,00
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	37.200.000,00	37.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0038.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Informasi dan Teknologi	288.200.000,00	288.200.000,00	100,00	141.000.000,00
5.1.02.02.01.0040.	Belanja Jasa Tenaga Operator Tilet	223.200.000,00	223.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0050.	Belanja Jasa Kalibrasi	200.000.000,00	191.875.506,00	95,93	11.200.000,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	0,00	0,00	18.444.751,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Tagihan Telepon	95.800.000,00	18.361.678,00	19,16	11.583.320,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	24.000.000,00	12.131.260,00	50,55	29.291.248.777,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	34.296.751.184,00	32.425.883.521,00	94,55	27.207.000,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	57.788.800,00	57.055.000,00	98,73	17.800.000,00
5.1.02.02.01.0065.	Belanja Penambahan Dayak	0,00	0,00	0,00	17.800.000,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	41.595.000,00	16.408.200,00	39,45	17.216.400,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	67.187.000,00	66.795.000,00	99,54	36.277.000,00
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembar	102.589.800,00	81.052.594,00	79,01	77.432.058,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Akuransi	89.796.000,00	72.784.000,00	81,05	72.282.000,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	89.796.000,00	72.784.000,00	81,05	72.282.000,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.02.0002	Belanja lunas jaminan kematian bagi Non ASN	6.889.830,00	4.666.277,30	67,73	2.852.819,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	43.651.200,00	43.651.200,00	100,00	43.651.200,00
5.1.02.02.04.0315	Belanja Sewa Peralatan Umum	43.651.200,00	43.651.200,00	100,00	43.651.200,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	30.500.000,00	30.500.000,00	100,00	27.900.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	27.900.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	137.820.000,00	136.020.000,00	98,69	518.700.300,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	30.000.000,00	28.450.000,50	94,83	374.597.300,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nisbat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00	99.526.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	107.620.000,00	107.570.000,00	99,77	36.580.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	462.413.400,00	380.783.200,00	78,02	387.120.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	79.390.000,00	79.198.500,00	99,76	0,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	383.023.400,00	281.564.700,00	73,51	387.130.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	38.700.000,00
5.1.02.02.12.0062	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	38.700.000,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	23.806.025,00	13.120.974,00	55,12	10.202.011,00
5.1.02.02.14.0004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.805.670,00	4.286.748,00	89,20	4.506.600,00
5.1.02.02.14.0006	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor	16.536.050,00	8.207.676,00	50,54	5.140.085,00
5.1.02.02.14.0017	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	2.462.300,00	476.550,00	19,35	559.317,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	448.750.000,00	448.107.938,00	99,88	349.081.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	234.750.000,00	234.750.000,00	100,00	266.180.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perancangan	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	60.000.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	48.700.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Pendingin	15.250.000,00	15.250.000,00	100,00	12.200.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Perangkat Komputer	0,00	0,00	0,00	21.900.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan	34.500.000,00	34.500.000,00	100,00	21.390.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	213.000.000,00	214.447.938,00	98,74	84.491.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	40.000.000,00	39.860.000,00	99,50	40.400.000,00
5.1.02.03.03.0014	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Perantara/Handara	175.000.000,00	174.647.938,00	99,80	54.091.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	48.400.000,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	38.200.000,00
5.1.02.03.04.0064	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	604.815.500,00	604.515.500,00	99,95	301.432.838,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	604.815.500,00	604.515.500,00	99,95	301.432.838,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	0,00	156.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	478.000.000,00	478.600.000,00	99,94	0,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	125.815.500,00	125.815.500,00	100,00	145.432.838,00
5.2	BELANJA MODAL	13.082.535.239,00	10.618.029.148,00	81,14	9.722.626.004,00
5.2.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	2.772.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	2.772.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	2.772.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.144.215.148,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	1.144.215.148,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	1.144.215.148,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	1.144.215.148,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	26.252.000,00	26.163.600,00	99,66	58.344.400,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermotor	26.252.000,00	26.163.600,00	99,66	58.344.400,00
5.2.02.03.02.0001	Belanja Modal Perbaikan Bengkel Konstruksi Logam	0,00	0,00	0,00	55.220.000,00
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perbaikan Bengkel Kerja	26.252.000,00	26.163.600,00	99,66	3.124.400,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	4.998.500,00
5.2.02.03.03.0021.	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.998.500,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	138.595.000,00	137.181.106,00	98,99	24.964.240,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	82.674.000,00	82.273.650,00	99,28	24.964.240,00
5.2.02.05.01.0002.	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	304.000,00	304.000,00	100,00	304.000,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	62.370.000,00	62.319.650,00	99,26	24.660.240,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	85.855.000,00	85.024.078,00	98,74	0,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Meubelair	54.151.000,00	52.480.076,00	98,76	0,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	11.704.000,00	11.544.000,00	98,63	0,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.066.000,00	9.943.380,00	98,78	0,00
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	10.066.000,00	9.943.380,00	98,78	0,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	21.601.000,00	15.974.018,00	50,85	61.822.308,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	21.601.000,00	15.974.018,00	50,85	16.399.908,00
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	16.170.000,00	15.974.018,00	98,79	4.739.908,00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	5.660.000,00
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	15.431.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	38.632.400,00
5.2.02.06.02.0008.	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	0,00	0,00	0,00	38.632.400,00
5.2.02.06.03.	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	12.870.000,00
5.2.02.06.03.0046.	Belanja Modal Peralatan Perangkapan Radio	0,00	0,00	0,00	12.870.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	84.116.000,00	83.907.300,00	99,83	62.382.560,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	51.054.000,00	50.961.000,00	99,82	48.337.740,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	51.054.000,00	50.961.000,00	99,82	48.337.740,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	33.062.000,00	32.846.300,00	99,35	14.054.820,00
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	33.062.000,00	32.846.300,00	99,35	14.054.820,00
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	63.717.000,00	62.853.972,00	98,65	0,00
5.2.02.15.02.	Belanja Modal Alat Pelindung	63.717.000,00	62.853.972,00	98,65	0,00
5.2.02.15.02.0005.	Belanja Modal Sepatu Lapangan	63.717.000,00	62.853.972,00	98,65	0,00
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	12.738.254.239,00	10.292.039.158,00	80,80	8.363.016.856,00
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	12.738.254.239,00	10.292.039.158,00	80,80	8.363.016.856,00
5.2.02.18.01.0002.	Belanja Modal Rambu Titik Berswar	12.738.254.239,00	10.292.039.158,00	80,80	8.363.016.856,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.152.480.000,00	1.954.884.190,00	90,82	705.270.050,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.152.480.000,00	1.954.884.190,00	90,82	705.270.050,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.152.480.000,00	1.954.884.190,00	90,82	705.270.050,00
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	506.000.000,00
5.2.03.01.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	190.000.000,00	189.836.000,00	99,91	0,00
5.2.03.01.01.0018.	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	250.000.000,00	248.241.000,00	99,32	199.270.050,00
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.712.480.000,00	1.517.007.190,00	88,59	0,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	73.956.000,00
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	73.956.000,00
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	0,00	0,00	0,00	73.956.000,00
5.2.04.01.01.0003.	Belanja Modal Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	73.956.000,00
	SURPLUS/DEFISIT	-63.717.150.208,00	-58.342.251.297,00		-51.060.872.850,00

SUMBER, 31 Desember 2022

Pengguna Anggaran


Drs. H. ASDUJAH, SA, MM.
Nip. 19640203 199009 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
LAPORAN PERTANGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN
 Pengguna Anggaran : Dr. H. ASOELLAH SA, MM.
 Bendahara Pengeluaran : SUWARTONO, SE.
 Tahun Anggaran : 2022

Bulan : Desember

KODE REKENING	URAIAN	Pegu APBD	SPJ LS Gaji		SPJ LS Barang dan Jasa		Belanja UP/DI/UTU			Jml. Belanja	Sisa DPA		
			Sd. Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini					
	BELANJA DASAR	44.525.120.208,00	6.831.870.889,00	1.211.104.114,00	8.112.873.081,00	17.899.880.510,00	8.305.738.891,00	66.891.418.605,00	5.447.521.158,00	774.795.354,00	6.342.316.810,00	50.876.736.997,00	3.348.488.611,00
2-18-02	PROGRAM PENYELANGKARAN LALU LINTAS DAN ANCIUTAN JALAN (LLAJ)	31.852.885.799	0	0	0	8.177.782.145	5.801.984.271	13.825.226.378	4.318.457.154	848.220.600	6.863.877.134	18.794.913.130	4.187.772.289
2-18-02.2.01	Penyediaan Bencanra tidak terduga (LLAJ Kabupaten/Kota)	343.878.100	0	0	0	79.198.500	79.198.900	79.198.900	83.488.790	0	83.488.790	142.987.300	1.181.500
2-18-02.2.01.02	Penyediaan Kebutuhan dan Sewa/hasi Perantara dalam perjalanan (LLAJ Kabupaten/Kota)	343.878.100	0	0	0	79.198.500	79.198.900	79.198.900	83.488.790	0	83.488.790	142.987.300	1.181.500
2-18-02.2.01.02.1	Biaya Perjalanan Pengiriman	408.800	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000	890.000	0
2-18-02.2.01.02.1.0001	Biaya Perjalanan untuk Logistik Kantor-Antar Kota	1.643.100	0	0	0	0	0	0	1.643.100	0	1,643.100	1,643.100	0
2-18-02.2.01.02.1.0025	Biaya Akadibahan untuk Logistik Kantor-Antar Kota	635.800	0	0	0	0	0	0	635.900	0	635.900	835.900	0
2-18-02.2.01.02.1.0026	Biaya Akadibahan untuk Logistik Kantor-Antar Kota	1.543.600	0	0	0	0	0	0	1.543.600	0	1,543.600	1,543.600	0
2-18-02.2.01.02.1.0054	Biaya Makanan dan Minuman	4.681.000	0	0	0	0	0	0	4.833.000	0	4.833.000	4.886.000	0
2-18-02.2.01.02.1.0055	Honorarium Honorarium Ziar	10.800.000	0	0	0	0	0	0	10.800.000	0	10,800.000	10,800.000	0
2-18-02.2.01.02.1.0056	Borang Sewa Bangunan Gedung	8.000.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	8,000.000	8,000.000	0
2-18-02.2.01.02.1.0057	Borang Sewa Bangunan Gedung	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4,000.000	4,000.000	0
2-18-02.2.01.02.1.0058	Borang Sewa Bangunan Gedung	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4,000.000	4,000.000	0
2-18-02.2.01.02.1.0059	Borang Sewa Bangunan Gedung	79.293.500	0	0	0	79.198.500	79.198.900	79.198.900	0	0	0	79.198.900	181.500

KODE REKENING	URAIAN	Pagu APBD	SPJ LS Gaji			SPJ LS Barang dan Jasa			Belanja UP/GU/TU			Jml. Belanja	Slisa DPA
			Sd. Bulan Laku	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	Sd. Bulan Laku	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	Sd. Bulan Laku	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini		
2.15.02.2.01.02 5.1.01.04.0.1.0003	Belanja Perjalanan Dinas Daerah Kota	34.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000.000	24.000.000	0
2.15.02.2.01.02 5.1.01.04.0.1.0003	Pembelian Perbaikan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	34.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000.000	32.273.343.982	2.687.181.717
2.15.02.2.01.02 5.1.01.04.0.1.0003	Pembelian Perbaikan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.276.186.788	0	0	0	0	0	0	0	0	1.276.186.788	1.239.928.488	36.178.200
2.15.02.2.01.02 5.1.01.04.0.1.0003	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	2.488.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.488.000	2.488.000	0
2.15.02.2.01.02 5.1.01.04.0.1.0003	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Peralatan	22.922.460	0	0	0	0	0	0	0	0	22.922.460	22.922.460	0
2.15.02.2.01.02 5.1.01.04.0.1.0004	Belanja Bahan-Bahan Baku (Bahan)	45.134.879	0	0	0	0	0	0	0	0	45.134.879	43.000.000	2.134.879
2.15.02.2.01.02 5.1.01.04.0.1.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	414.575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	414.575.000	414.575.000	0
2.15.02.2.01.02 5.1.01.04.0.1.0013	Belanja Bahan-Bahan Baku	4.389.200	0	0	0	0	0	0	0	0	4.389.200	4.389.200	0
2.15.02.2.01.02 5.1.01.04.0.1.0014	Belanja Bahan-Bahan Baku	10.523.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.523.000	10.523.000	0
2.15.02.2.01.02 5.1.01.04.0.1.0015	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.987.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.987.500	1.987.500	0
2.15.02.2.01.02 5.1.01.04.0.1.0018	Belanja Bahan-Bahan Baku	3.387.800	0	0	0	0	0	0	0	0	3.387.800	3.387.800	0
2.15.02.2.01.02 5.1.01.04.0.1.0021	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.840.000	1.840.000	0
2.15.02.2.01.02 5.1.01.04.0.1.0028	Belanja Bahan-Bahan Baku	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000	0
2.15.02.2.01.02 5.1.01.04.0.1.0038	Belanja Bahan-Bahan Baku	37.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.200.000	37.200.000	0
2.15.02.2.01.02 5.1.01.04.0.1.0039	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.184.000	2.184.000	0
2.15.02.2.01.02 5.1.01.04.0.1.0046	Belanja Bahan-Bahan Baku	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	144.000	144.000	0
2.15.02.2.01.02 5.1.01.04.0.1.0047	Belanja Bahan-Bahan Baku	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	148.000	148.000	0
2.15.02.2.01.02 5.1.01.04.0.1.0051	Belanja Bahan-Bahan Baku	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0
2.15.02.2.01.02 5.1.01.04.0.1.0052	Belanja Bahan-Bahan Baku	40.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.200.000	40.200.000	0
2.15.02.2.01.02 5.1.01.04.0.1.0055	Belanja Bahan-Bahan Baku	80.376.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.376.000	80.376.000	0
2.15.02.2.01.02 5.1.01.04.0.1.0056	Belanja Bahan-Bahan Baku	984.341.000	0	0	0	0	0	0	0	0	984.341.000	984.341.000	0
2.15.02.2.01.02 5.1.01.04.0.1.0057	Belanja Bahan-Bahan Baku	12.464.413.829	0	0	0	0	0	0	0	0	12.464.413.829	12.464.413.829	0
2.15.02.2.01.02 5.1.01.04.0.1.0060	Belanja Bahan-Bahan Baku	62.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	62.400.000	62.400.000	0

KODE REKENING	URAIAN	Page APBD	SPJ LS Gaji			SPJ LS Barang dan Jasa			Belanja UP:IGUTU			Jml. Belanja	Sisa DPA
			Sd. Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	Sd. Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	Sd. Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini		
2-15-02.3.03.01	Belanja Pembelian untuk Coporan Kantor - Kantor oleh Ganti	358.500	0	0	0	0	0	0	0	358.500	358.500	0	
2-15-02.3.03.02	Belanja Akut-Bekas untuk Revisi dan Revisi	4.117.000	0	0	0	0	0	0	0	4.117.000	4.117.000	0	
2-15-02.3.03.03	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000.000	35.000.000	1.900.000	
2-15-02.3.03.04	Belanja Jasa Kebersihan	15.500.000	0	0	0	0	0	0	0	15.500.000	15.500.000	0	
2-15-02.3.03.05	Belanja Jasa Kebersihan	11.400.000	0	0	0	0	0	0	0	11.400.000	11.400.000	0	
2-15-02.3.03.06	Belanja Jasa Kebersihan	250.000.000	0	0	0	145.719.300	0	0	0	145.719.300	248.941.000	2.058.000	
2-15-02.3.03.07	Belanja Jasa Kebersihan	349.899.000	0	0	0	248.822.938	0	0	0	248.822.938	356.662.700	3.337.062	
2-15-02.3.03.08	Belanja Jasa Kebersihan	2.985.000	0	0	0	0	0	0	0	2.985.000	2.985.000	0	
2-15-02.3.03.09	Belanja Jasa Kebersihan	2.784.200	0	0	0	0	0	0	0	2.784.200	2.784.200	0	
2-15-02.3.03.10	Belanja Jasa Kebersihan	1.488.000	0	0	0	0	0	0	0	1.488.000	1.488.000	0	
2-15-02.3.03.11	Belanja Jasa Kebersihan	288.000	0	0	0	0	0	0	0	288.000	288.000	0	
2-15-02.3.03.12	Belanja Jasa Kebersihan	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000	0	
2-15-02.3.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	36.000	
2-15-02.3.03.14	Belanja Jasa Kebersihan	175.000.000	0	0	0	145.822.838	0	0	0	145.822.838	314.647.978	352.002	
2-15-02.3.03.15	Belanja Jasa Kebersihan	381.209.000	0	0	0	0	0	0	0	381.209.000	377.143.858	4.156.742	
2-15-02.3.03.16	Belanja Jasa Kebersihan	230.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000	0	
2-15-02.3.03.17	Belanja Jasa Kebersihan	1.705.000	0	0	0	0	0	0	0	1.705.000	1.705.000	0	
2-15-02.3.03.18	Belanja Jasa Kebersihan	889.000	0	0	0	0	0	0	0	889.000	889.000	0	
2-15-02.3.03.19	Belanja Jasa Kebersihan	866.400	0	0	0	0	0	0	0	866.400	866.400	0	
2-15-02.3.03.20	Belanja Jasa Kebersihan	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	
2-15-02.3.03.21	Belanja Jasa Kebersihan	23.100.000	0	0	0	0	0	0	0	23.100.000	23.100.000	0	
2-15-02.3.03.22	Belanja Jasa Kebersihan	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	18.000.000	0	

KODE REKENING	URAIAN	Pagu APBD	SPJ LS Gaji			SPJ LS Barang dan Jasa			Belanja UP/GU/TU			Jml. Belanja	Sisa DPA
			Sd. Bulan Laku	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	Sd. Bulan Laku	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	Sd. Bulan Laku	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini		
2.15.02.2.03.06. 5.1.02.01.0.1.0027.	Belanja jasa "selapa Coorner Kangpilar"	14.400.000	0	0	0	0	0	0	68.700.000	6.300.000	74.100.000	74.420.000	0
2.15.02.2.03.05. 5.1.02.01.0.1.0040.	Belanja jasa "Tengg Cuyakar Tlatar"	222.200.000	0	0	0	0	0	0	304.800.000	18.600.000	323.400.000	222.200.000	0
2.15.02.2.03.05. 5.1.02.01.0.1.0045.	Belanja jasa "jamban Revalidasi bagi RW 43M"	18.544.000	0	0	0	0	0	0	18.344.000	1.370.000	19.714.000	53.864.000	2.900.000
2.15.02.2.03.05. 5.1.02.01.0.1.0056.	Kecelakaan "Arzano Kertokusari kemp bag/ RW 43M"	1.234.000	0	0	0	0	0	0	683.874	63.839	747.713	743.820	416.157
2.15.02.2.03.05. 5.1.02.01.0.1.0657.	Belanja jasa "jamban Kemandi bag RW 43M"	1.438.000	0	0	0	0	0	0	603.690	85.785	689.475	677.055	496.848
2.15.02.2.03.05. 5.1.02.01.0.1.0003.	Belanja "Perbaikan Dapur Dataran kota"	8.400.000	0	0	0	0	0	0	7.500.000	900.000	8.400.000	8.400.000	0
2.15.02.2.04.01. 5.1.02.01.0.1.0028.	Penyerahan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.343.645.880	0	0	0	0	0	0	223.588.427	42.794.876	266.383.303	2.044.026.182	199.832.668
2.15.02.2.04.01. 5.1.02.01.0.1.0030.	Fasilitas pemenuhan Perencanaan "Perbaikan Uda Pembangunan Fasilitas Parkir kemungkinan Kolaborasi/Unit dengan Unitan Pelayanan Perbaikan Berwujud Tertinggi/Presi sacara Elektronik"	2.096.770.600	0	0	0	0	0	0	1.276.100	24.465.900	26.742.000	1.880.233.190	196.336.830
2.15.02.2.04.01. 5.1.02.01.0.1.0034.	Stasiun "Hanyutan Pengisian Sempolita"	3.810.000	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.100.000	3.300.000	600.000
2.15.02.2.04.01. 5.1.02.01.0.1.0034.	Stasiun "AlurBalas untuk tanggapan Kantor RW 1-6 Kantor"	3.480.810	0	0	0	0	0	0	1.632.900	1.845.900	3.478.800	3.498.800	0
2.15.02.2.04.01. 5.1.02.01.0.1.0029.	Stasiun "AlurBalas untuk tanggapan Kantor RW 1-6 Kantor"	321.250	0	0	0	0	0	0	521.200	0	521.200	521.200	0
2.15.02.2.04.01. 5.1.02.01.0.1.0018.	Belanja jasa "Kecamatan Perencanaan Belanja-Rata Perencanaan Belanja-Rata Bangunan Gedung"	34.320.000	0	0	0	0	0	0	0	28.320.000	18.320.000	64.876.000	250.000
2.15.02.2.04.01. 5.1.02.01.0.1.0028.	Belanja jasa "Kecamatan Perencanaan Belanja-Rata Perencanaan Belanja-Rata Bangunan Gedung"	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289.836.000	184.000
2.15.02.2.04.01. 5.1.02.01.0.1.0022.	Belanja "Masa Tanggapan Terbatas Umum"	1.122.480.000	0	0	0	0	0	0	1.317.607.190	1.517.007.190	1.517.007.190	952.472.820	0
2.15.02.2.04.02. 5.1.02.01.0.1.0022.	Kontribusi dan "Sikretariat Perencanaan Pelaksanaan Uda Pembangunan Fasilitas Parkir Kemungkinan Kolaborasi/Unit dengan Unitan Pelayanan"	229.196.800	0	0	0	0	0	0	218.394.827	17.879.676	236.274.503	2.476.799	0
2.15.02.2.04.02. 5.1.02.01.0.1.0002.	Solaris "Hanyutan Pengisian Sempolita"	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
2.15.02.2.04.02. 5.1.02.01.0.1.0004.	Stasiun "Balok-Rubin Balok dan Pemas"	11.808.000	0	0	0	0	0	0	9.504.000	6.322.000	15.826.000	15.826.000	0
2.15.02.2.04.02. 5.1.02.01.0.1.0014.	Stasiun "AlurBalas untuk tanggapan Kantor RW 1-6 Kantor"	2.902.800	0	0	0	0	0	0	1.408.200	1.501.600	2.909.800	2.909.800	0
2.15.02.2.04.02. 5.1.02.01.0.1.0025.	Stasiun "AlurBalas untuk tanggapan Kantor RW 1-6 Kantor"	1.187.500	0	0	0	0	0	0	1.187.500	0	1.187.500	1.187.500	0
2.15.02.2.04.02. 5.1.02.01.0.1.0028.	Stasiun "AlurBalas untuk tanggapan Kantor RW 1-6 Kantor"	1.042.400	0	0	0	0	0	0	1.042.400	0	1.042.400	1.042.400	0

KODE REKENING	URAIAN	Pagu APBD	SPJ LS Gaji			SPJ LS Barang dan Jasa			Belanja UP/GU/TU			Jml. Belanja	Sisa DPA
			Sd. Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	Sd. Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini			
2-15.02.2.05.03	Belanja Kebutuhan Untuk Up. Berbasis Kelembagaan Berstruktur	886.527.000	0	0	0	0	0	0	848.423.240	41.383.859	489.748.899	489.748.899	7.189.801
2-15.02.2.05.03	Belanja Bahan-Bahan Baku dan Pakar	79.084.000	0	0	0	0	0	0	68.427.000	30.656.999	79.084.000	79.084.000	0
2-15.02.2.05.03	Belanja Bahan-Bahan Baku dan Pakar	28.844.000	0	0	0	0	0	0	19.644.800	0	19.644.800	19.644.800	0
2-15.02.2.05.03	Belanja Bahan-Bahan Baku dan Pakar	14.866.000	0	0	0	0	0	0	14.866.200	0	14.866.200	14.866.200	4.800
2-15.02.2.05.03	Belanja Kebutuhan untuk Kegiatan Kantor-Jasa Tulis Kantor	20.795.000	0	0	0	0	0	0	19.782.000	0	19.782.000	19.782.000	417.500
2-15.02.2.05.03	Belanja Kebutuhan untuk Kegiatan Kantor-Jasa Tulis Kantor	1.563.000	0	0	0	0	0	0	1.563.600	0	1.563.600	1.563.600	0
2-15.02.2.05.03	Belanja Kebutuhan untuk Kegiatan Kantor-Jasa Tulis Kantor	2.750.000	0	0	0	0	0	0	1.202.900	1.000.000	2.202.800	2.202.800	0
2-15.02.2.05.03	Belanja Kebutuhan untuk Kegiatan Kantor-Jasa Tulis Kantor	21.800.000	0	0	0	0	0	0	68.208.000	6.700.000	74.908.000	74.908.000	0
2-15.02.2.05.03	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.800.000	0	0	0	0	0	0	17.206.900	1.995.000	19.201.900	19.201.900	0
2-15.02.2.05.03	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.480.000	0	0	0	0	0	0	15.906.800	1.455.000	17.361.800	17.361.800	0
2-15.02.2.05.03	Belanja Jasa Tenaga Teknis	37.280.000	0	0	0	0	0	0	34.284.800	3.100.000	37.384.800	37.384.800	0
2-15.02.2.05.03	Belanja Jasa Tenaga Teknis	227.288.000	0	0	0	0	0	0	118.052.800	13.602.000	131.654.800	131.654.800	0
2-15.02.2.05.03	Belanja Jasa Tenaga Teknis	20.032.000	0	0	0	0	0	0	17.912.000	4.662.000	22.574.000	22.574.000	0
2-15.02.2.05.03	Belanja Jasa Tenaga Teknis	15.324.000	0	0	0	0	0	0	9.302.000	798.000	10.100.000	10.100.000	5.224.000
2-15.02.2.05.03	Belanja Jasa Tenaga Teknis	1.000.000	0	0	0	0	0	0	537.200	52.589	589.789	589.789	418.013
2-15.02.2.05.03	Belanja Jasa Tenaga Teknis	1.138.000	0	0	0	0	0	0	892.215	68.271	960.486	960.486	418.402
2-15.02.2.05.03	Belanja Jasa Tenaga Teknis	25.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0
2-15.02.2.05.03	Belanja Jasa Tenaga Teknis	25.000.000	0	0	0	0	0	0	27.178.000	1.170.300	28.348.300	28.348.300	0
2-15.02.2.05.03	Belanja Jasa Tenaga Teknis	539.996.000	0	0	0	0	0	0	373.660.000	48.918.319	422.578.319	422.578.319	117.347.689
2-15.02.2.05.04	Belanja Kebutuhan Perjalanan Dinas	1.910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.910.000
2-15.02.2.05.04	Belanja Kebutuhan Perjalanan Dinas	938.040.000	0	0	0	0	0	0	371.883.000	48.288.318	420.171.318	420.171.318	115.281.500
2-15.02.2.05.04	Belanja Kebutuhan Perjalanan Dinas	216.187.000	0	0	0	0	0	0	187.635.500	6.825.000	194.460.500	194.460.500	2.364.500
2-15.02.2.05.04	Belanja Kebutuhan Perjalanan Dinas	130.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0

KODE REKENING	URAIAN	Pagu APBD	SPJ LS Gaji			SPJ LS Barang dan Jasa			Belanja UPI/GU/TU			Jml. Belanja	Sisa DPA
			Sd. Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	Sd. Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini			
2.15.02.2.00.01. 5.1.02.01.0.1.0034	Belanja Himpunan untuk kegiatan Kantor-ABC, Kota Kutub	411.000	0	0	0	0	0	412.000	0	0	412.000	0	
2.15.02.2.00.07. 5.1.02.01.0.1.0005	Belanja Hiburan dan Minuman Ragat	1.600.000	0	0	0	0	0	600.000	3.000.000	3.600.000	3.600.000	0	
2.15.02.2.00.07. 5.1.02.01.0.1.0006	Belanja Jasa Call/Out	202.000.000	0	0	0	0	0	387.633.500	0	0	387.633.500	2.364.500	
2.15.02.2.00.07. 5.1.02.01.0.1.0004	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.625.000	0	0	0	0	0	2.250.000	3.370.000	5.620.000	5.620.000	0	
2.15.02.2.00.08. 5.1.02.01.0.1.0003	Pembinaan Masyarakat dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3.328.343.100	0	0	0	0	0	394.825.100	96.047.154	1.490.872.254	1.490.872.254	188.812.846	
2.15.02.2.00.01. 5.1.02.01.0.1.0004	Pembinaan Masyarakat dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	378.877.000	0	0	0	0	0	363.787.000	3.184.000	376.971.000	376.971.000	0	
2.15.02.2.00.01. 5.1.02.01.0.1.0004	Belanja Bahan-Bahan Baku dan Peralatan	11.778.200	0	0	0	0	0	10.674.400	1.064.800	11.739.200	11.739.200	0	
2.15.02.2.00.01. 5.1.02.01.0.1.0004	Belanja Perjalanan untuk kegiatan Kantor-ABC, Kota Kutub	11.343.300	0	0	0	0	0	11.343.300	0	11.343.300	11.343.300	0	
2.15.02.2.00.01. 5.1.02.01.0.1.0005	Belanja Perjalanan untuk kegiatan Kantor-ABC dan Kantor	1.124.100	0	0	0	0	0	1.124.100	0	1.124.100	1.124.100	0	
2.15.02.2.00.01. 5.1.02.01.0.1.0018	Belanja Hiburan untuk kegiatan Kantor-ABC dan Kantor	781.000	0	0	0	0	0	781.000	0	781.000	781.000	0	
2.15.02.2.00.01. 5.1.02.01.0.1.0018	Belanja Hiburan untuk kegiatan Kantor-ABC dan Kantor	3.951.000	0	0	0	0	0	3.951.000	0	3.951.000	3.951.000	0	
2.15.02.2.00.01. 5.1.02.01.0.1.0021	Belanja Hiburan untuk kegiatan Kantor-ABC dan Kantor	9.900.000	0	0	0	0	0	7.830.000	2.100.000	9.930.000	9.930.000	0	
2.15.02.2.00.01. 5.1.02.01.0.1.0018	Belanja Hiburan untuk kegiatan Kantor-ABC dan Kantor	46.200.000	0	0	0	0	0	46.200.000	0	46.200.000	46.200.000	0	
2.15.02.2.00.01. 5.1.02.01.0.1.0012	Belanja Jasa Tenaga Penunjang	177.200.000	0	0	0	0	0	277.200.000	0	277.200.000	277.200.000	0	
2.15.02.2.00.01. 5.1.02.01.0.1.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.205.300	0	0	0	0	0	8.315.000	0	8.315.000	8.315.000	0	
2.15.02.2.00.01. 5.1.02.01.0.1.0002	Belanja Hiburan untuk kegiatan Kantor-ABC dan Kantor	304.000	0	0	0	0	0	304.000	0	304.000	304.000	0	
2.15.02.2.00.03. 5.1.01.01.0.1.0002	US Cobas dan Susut/Asas Pelaksanaan Managemen dan Kabupaten Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	302.353.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302.353.600	
2.15.02.2.00.03. 5.1.01.01.0.1.0002	Belanja Hiburan untuk kegiatan Kantor-ABC dan Kantor	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	
2.15.02.2.00.03. 5.1.03.01.0.1.0006	Belanja Hiburan untuk kegiatan Kantor-ABC dan Kantor	1.402.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.402.000	
2.15.02.2.00.03. 5.1.03.01.0.1.0006	Belanja Jasa Konsultansi/Perencanaan/Leptan/Asas Kabupaten/Kota	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	
2.15.02.2.00.04. 5.1.03.01.0.1.0004	Pengembangan dan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Kibijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	677.842.800	0	0	0	0	0	552.680.000	12.502.194	645.182.194	645.182.194	32.364.319	
2.15.02.2.00.04. 5.1.03.01.0.1.0004	Belanja Hiburan Baku dan Lain-Lain	84.132.200	0	0	0	0	0	11.778.000	17.093.000	28.871.000	28.871.000	13.251.200	

KODE REKERING	URAIAN	Pagu APBD	SPJ LS Gaji			SPJ LS Barang dan jasa			Belanja UP/OUTU			Jml. Belanja	Sisa DPA	
			Sd. Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	Sd. Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	Sd. Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini			
2-15.02.2.06.04	Belanja Subsidi Cradling Suku Cadang Alat Angkut	33.345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.448.000	12.448.000	0	
5-15.02.01.01.00013														
2-15.02.2.06.04	Belanja Asuransi untuk kegiatan Kantor-Asuransi	5.344.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.834.000	5.344.000	0	
5-15.02.01.01.00024														
2-15.02.2.06.04	Belanja Asuransi untuk kegiatan Kantor-Asuransi dan Ganti	2.271.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.947.000	2.271.000	0	
5-15.02.01.01.00023														
2-15.02.2.06.04	Belanja Asuransi untuk kegiatan Kantor-Asuransi	2.084.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.847.400	2.084.000	0	
5-15.02.01.01.00025														
2-15.02.2.06.04	Belanja Asuransi untuk kegiatan Kantor-Asuransi	1.838.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.626.000	1.838.000	0	
5-15.02.01.01.00022														
2-15.02.2.06.04	Belanja Asuransi untuk kegiatan Kantor-Asuransi	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.716.000	5.400.000	0	
5-15.02.01.01.00021														
2-15.02.2.06.04	Belanja Asuransi untuk kegiatan Kantor-Asuransi	31.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	27.488.000	31.480.000	0	
5-15.02.01.01.00020														
2-15.02.2.06.04	Belanja Asuransi untuk kegiatan Kantor-Asuransi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-15.02.01.01.00019														
2-15.02.2.06.04	Belanja Asuransi untuk kegiatan Kantor-Asuransi	188.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.200.000	188.000.000	0	
5-15.02.01.01.00018														
2-15.02.2.06.04	Belanja jasa Tenaga Penerimaan dan Sertifikasi	21.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	34.200.000	37.200.000	0	
5-15.02.01.01.00017														
2-15.02.2.06.04	Belanja jasa Tenaga Administrasi	115.110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	106.330.000	138.220.000	16.890.000	
5-15.02.01.01.00016														
2-15.02.2.06.04	Belanja jasa Tenaga Pengurusan	13.181.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.818.000	43.999	11.528.000	
5-15.02.01.01.00015														
2-15.02.2.06.04	Belanja jasa Tenaga Pengurusan	861.000	0	0	0	0	0	0	0	0	496.044	657.042	314.168	
5-15.02.01.01.00014														
2-15.02.2.06.04	Belanja jasa-jurusan Kelembagaan Kantor-Asuransi	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	645.024	696.020	306.370	
5-15.02.01.01.00013														
2-15.02.2.06.04	Belanja jasa-jurusan Kelembagaan Kantor-Asuransi	43.071.200	0	0	0	0	0	0	0	0	43.033.100	43.033.100	0	
5-15.02.01.01.00012														
2-15.02.2.06.04	Belanja Sewa Perawatan Umum	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	
5-15.02.01.01.00011														
2-15.02.2.06.04	Belanja Perawatan Alat Angkut-Asuransi	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	
5-15.02.01.01.00010														
2-15.02.2.06.04	Belanja Perawatan Dinas Dalam Kota	10.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.300.000	10.300.000	0	
5-15.02.01.01.00009														
2-58.02.3.06.01	Forum Lulus Lulus dan Kegiatan lain Kabupaten/Kota	75.437.300	0	0	0	0	0	0	0	0	74.437.300	74.437.300	1.000.000	
5-58.02.01.01.00008														
2-15.02.2.06.04	Belanja Asuransi untuk kegiatan Kantor-Asuransi	3.243.100	0	0	0	0	0	0	0	0	3.243.100	3.243.100	0	
5-15.02.01.01.00007														
2-15.02.2.06.04	Belanja Asuransi untuk kegiatan Kantor-Asuransi	312.200	0	0	0	0	0	0	0	0	312.200	312.200	0	
5-15.02.01.01.00006														
2-15.02.2.06.04	Belanja Asuransi untuk kegiatan Kantor-Asuransi	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0	
5-15.02.01.01.00005														
2-15.02.2.06.04	Belanja Asuransi untuk kegiatan Kantor-Asuransi	61.401.000	0	0	0	0	0	0	0	0	61.401.000	61.401.000	0	
5-15.02.01.01.00004														

KODE REKENING	URAIAN	Pagu APBD	SPJ LS Gaji			SPJ LS Barang dan Jasa			Belanja UP/GU/TU			Jml. Belanja	Sisa DPA
			Sd. Bulan Laju	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	Sd. Bulan Laju	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	Sd. Bulan Laju	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini		
2-15-02-2-01	Perbaikan Hasil Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	374.357.488	0	0	0	89.866.960	0	89.866.960	344.662.789	37.263.363	270.871.450	388.823.850	4.333.450
2-15-02-2-07-01	Penelitian Kelayakan Teknis Gedung Administrasi	133.064.288	0	0	0	89.866.960	0	89.866.960	32.074.300	0	32.074.300	133.774.300	190.288
2-15-02-2-07-02	Belanja Anggaran untuk kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	811.700	0	0	0	0	0	0	822.730	0	822.730	822.730	90.020
2-15-02-2-07-03	Belanja Anggaran untuk kegiatan Kantor Bahan Kertas	831.500	0	0	0	0	0	0	451.500	0	451.500	451.500	0
2-15-02-2-07-04	Belanja Jasa Konsultansi Konsultansi Layanan Jasa Konsultansi Manajemen	100.000.000	0	0	0	95.880.000	0	95.880.000	0	0	0	99.880.000	200.000
2-15-02-2-07-05	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.500.000	0	0	0	0	0	0	31.500.000	0	31.500.000	31.500.000	0
2-15-02-2-07-06	Kontribusi dan Sumbangan Pembinaan Hasil Audit	243.293.288	0	0	0	0	0	0	211.668.889	25.363.363	237.046.350	337.648.750	4.343.400
2-15-02-2-07-07	Belanja Bahan-Bahan Baku dan Pencetakan	21.146.888	0	0	0	0	0	0	17.713.200	3.897.688	21.748.800	21.748.800	0
2-15-02-2-07-08	Belanja Bahan Cetak dan Cetak A.C. Angkutan	7.946.400	0	0	0	0	0	0	7.946.400	0	7.946.400	7.946.400	0
2-15-02-2-07-09	Belanja Kebutuhan untuk kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	21.483.000	0	0	0	0	0	0	33.000.300	3.700.700	18.209.880	18.810.000	3.824.000
2-15-02-2-07-10	Belanja Kebutuhan untuk kegiatan Kantor-Bahan dan Cetak	3.024.000	0	0	0	0	0	0	3.024.000	0	3.024.000	3.024.000	0
2-15-02-2-07-11	Belanja Kebutuhan untuk kegiatan Kantor-Bahan dan Cetak	3.024.000	0	0	0	0	0	0	1.543.800	0	1.543.800	1.543.800	0
2-15-02-2-07-12	Belanja Kebutuhan untuk kegiatan Kantor-Bahan dan Cetak	1.463.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0
2-15-02-2-07-13	Belanja Kebutuhan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis	1.400.000	0	0	0	0	0	0	20.250.000	4.110.000	34.300.000	34.300.000	850.000
2-15-02-2-07-14	Belanja Kebutuhan dan Material Pajak	25.000.000	0	0	0	0	0	0	9.300.000	0	9.300.000	9.300.000	0
2-15-02-2-07-15	Belanja Kebutuhan dan Pencetakan, Material, Peralatan Acara, dan Peralatan	9.300.000	0	0	0	0	0	0	50.930.000	5.455.000	85.400.000	85.400.000	0
2-15-02-2-07-16	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.400.000	0	0	0	0	0	0	37.000.000	3.500.000	18.000.000	18.500.000	0
2-15-02-2-07-17	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	18.800.000	0	0	0	0	0	0	44.000.000	6.000.000	50.140.000	50.140.000	810.000
2-15-02-2-07-18	Belanja Jasa Tenaga Pengajaran	50.710.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	300.000	4.200.000	4.200.000	100.000
2-15-02-2-07-19	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan bagi BSN APK	4.400.000	0	0	0	0	0	0	145.348	13.020	180.116	180.116	187.624
2-15-02-2-07-20	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan bagi BSN APK	300.000	0	0	0	0	0	0	212.901	18.813	231.774	231.774	103.820
2-15-02-2-07-21	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan bagi BSN APK	300.000	0	0	0	0	0	0	10.800.000	0	10.800.000	10.800.000	0
2-15-02-2-07-22	Belanja Pendidikan dan Anggaran dan Anggaran Lain Berkaitan dengan Pendidikan	10.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KODE REKENING	URAIAN	Pagu APBD	SPJ LS Gaji			SPJ LS Barang dan Jasa			Belanja UP:IGU:TU			Jml. Belanja	Sisa DPA
			Sd. Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	Sd. Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini		
2.15.02.2.14.01	Fasilitas pemenuhan persyaratan pemenuhan tdk Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kerentangan Ekspedisi Kota dalam rangka pelayanan perbaikan bus/taha terintegrasi secara sistematis	45.933.000	0	0	0	0	0	45.343.866	0	45.343.866	45.343.866	210.000	
2.15.02.2.14.01.5.1.01.01.01.0000	Belanja Humancum Pengisian Bencu-yaha	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	0	
2.15.02.2.14.01.5.1.02.01.01.0000	Belanja Akutibahan untuk kegiatan Kantor Adm. Taha Kutor	2.200.500	0	0	0	0	0	2.200.500	0	2.200.500	2.200.500	0	
2.15.02.2.14.01.5.1.02.01.01.0000	Belanja Akutibahan untuk kegiatan Kantor. Kantor dan Candi	400.500	0	0	0	0	0	400.500	0	400.500	400.500	0	
2.15.02.2.14.01.5.1.02.01.01.0000	Belanja Akutibahan untuk kegiatan Kantor. Kantor dan Candi	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	
2.15.02.2.14.01.5.1.02.01.01.0000	Belanja Akutibahan untuk kegiatan Kantor. Kantor dan Candi	25.700.000	0	0	0	0	0	25.700.000	0	25.700.000	25.700.000	0	
2.15.02.2.14.01.5.1.02.01.01.0000	Belanja Akutibahan untuk kegiatan Kantor. Kantor dan Candi	8.225.000	0	0	0	0	0	8.225.000	0	8.225.000	8.225.000	0	
2.15.02.2.14.01.5.1.02.01.01.0000	Belanja Akutibahan untuk kegiatan Kantor. Kantor dan Candi	45.793.866	0	0	0	0	0	45.343.866	0	45.343.866	45.343.866	0	
2.15.02.2.14.01.5.1.02.01.01.0000	Belanja Akutibahan untuk kegiatan Kantor. Kantor dan Candi	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	
2.15.02.2.14.01.5.1.02.01.01.0000	Belanja Akutibahan untuk kegiatan Kantor. Kantor dan Candi	18.711.100	0	0	0	0	0	18.711.100	0	18.711.100	18.711.100	0	
2.15.02.2.14.01.5.1.02.01.01.0000	Belanja Akutibahan untuk kegiatan Kantor. Kantor dan Candi	1.047.000	0	0	0	0	0	1.047.000	0	1.047.000	1.047.000	0	
2.15.02.2.14.01.5.1.02.01.01.0000	Belanja Akutibahan untuk kegiatan Kantor. Kantor dan Candi	801.000	0	0	0	0	0	801.000	0	801.000	801.000	0	
2.15.02.2.14.01.5.1.02.01.01.0000	Belanja Akutibahan untuk kegiatan Kantor. Kantor dan Candi	801.000	0	0	0	0	0	801.000	0	801.000	801.000	0	
2.15.02.2.14.01.5.1.02.01.01.0000	Belanja Akutibahan untuk kegiatan Kantor. Kantor dan Candi	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0	
2.15.02.2.14.01.5.1.02.01.01.0000	Belanja Akutibahan untuk kegiatan Kantor. Kantor dan Candi	21.125.000	0	0	0	0	0	21.125.000	0	21.125.000	21.125.000	0	
2.15.02.2.14.01.5.1.02.01.01.0000	Belanja Akutibahan untuk kegiatan Kantor. Kantor dan Candi	2.714.000	0	0	0	0	0	2.714.000	0	2.714.000	2.714.000	0	
2.15.02.2.14.01.5.1.02.01.01.0000	Belanja Akutibahan untuk kegiatan Kantor. Kantor dan Candi	2.714.000	0	0	0	0	0	2.714.000	0	2.714.000	2.714.000	0	
2.15.02.2.14.01.5.1.02.01.01.0000	Belanja Akutibahan untuk kegiatan Kantor. Kantor dan Candi	415.837.285	0	0	0	0	0	415.837.285	0	415.837.285	415.837.285	0	
2.15.02.2.14.01.5.1.02.01.01.0000	Belanja Akutibahan untuk kegiatan Kantor. Kantor dan Candi	6.921.270.897	0	0	0	0	0	6.921.270.897	0	6.921.270.897	6.921.270.897	0	
2.15.02.2.14.01.5.1.02.01.01.0000	Belanja Akutibahan untuk kegiatan Kantor. Kantor dan Candi	44.542.434.409	0	0	0	0	0	44.542.434.409	0	44.542.434.409	44.542.434.409	0	
2.15.02.2.14.01.5.1.02.01.01.0000	Belanja Akutibahan untuk kegiatan Kantor. Kantor dan Candi	161.215.480	0	0	0	0	0	161.215.480	0	161.215.480	161.215.480	0	
2.15.02.2.14.01.5.1.02.01.01.0000	Belanja Akutibahan untuk kegiatan Kantor. Kantor dan Candi	65.380.660	0	0	0	0	0	65.380.660	0	65.380.660	65.380.660	0	

KODE REKENING	URAIAN	Pagu APBD	SPJ LS Gaji			SPJ LS Barang dan jasa			Belanja UP/IGUTU			Jml. Belanja	Sisa DPA
			Sd. Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	Sd. Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	Sd. Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini		
2.15.01.2.01.01	Belanja Pembelian untuk kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	4.184.800	0	0	0	0	0	0	1.988.400	1.988.400	4.184.800	0	
5.1.02.01.01.00024													
2.15.01.2.01.01	Belanja pembelian untuk kegiatan Kantor Substansi Komputer	4.923.280	0	0	0	0	0	0	4.920.280	4.920.280	4.923.280	0	
5.1.02.01.01.00026													
2.15.01.2.01.01	Belanja Peralatan dan Mesin	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	
5.1.02.01.01.00052													
2.15.01.2.01.01	Belanja Pembelian untuk kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	5.500.000	0	0	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	
5.1.02.01.01.00053													
2.15.01.2.01.01	Belanja Jasa Tenaga Intelektual dan Teknis	20.200.000	0	0	0	0	0	0	25.270.890	2.350.200	28.208.000	0	
5.1.02.01.01.00054													
2.15.01.2.01.01	Belanja Lain-lain	8.644.000	0	0	0	0	0	0	1.954.000	94.000	1.128.000	0	
5.1.02.01.01.00055													
2.15.01.2.01.01	Belanja untuk pembelian perlengkapan bagi Non ASN	1.128.000	0	0	0	0	0	0	41.331	3.737	45.068	0	
5.1.02.01.01.00056													
2.15.01.2.01.01	Belanja untuk pembelian perlengkapan bagi Non ASN	77.000	0	0	0	0	0	0	51.703	4.008	56.411	0	
5.1.02.01.01.00058													
2.15.01.2.01.01	Belanja untuk pembelian perlengkapan bagi Non ASN	84.000	0	0	0	0	0	0	8.325.900	0	8.325.900	0	
5.1.02.01.01.00059													
2.15.01.2.01.01	Belanja perjalanan dinas	8.325.000	0	0	0	0	0	0	28.888.000	0	28.888.000	0	
5.1.02.01.01.00061													
2.15.01.2.01.01	Kendaraan dan Perawatan Kendaraan	26.858.000	0	0	0	0	0	0	7.086.000	0	7.086.000	0	
5.1.02.01.01.00062													
2.15.01.2.01.01	Belanja pembelian untuk kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	7.086.000	0	0	0	0	0	0	702.000	0	702.000	0	
5.1.02.01.01.00064													
2.15.01.2.01.01	Belanja pembelian untuk kegiatan Kantor - Kantor dan Cetak	762.000	0	0	0	0	0	0	4.800.000	0	4.800.000	0	
5.1.02.01.01.00065													
2.15.01.2.01.01	Belanja perjalanan dinas	4.800.000	0	0	0	0	0	0	54.310.000	0	54.310.000	0	
5.1.02.01.01.00066													
2.15.01.2.01.01	Belanja Lain-lain	14.310.000	0	0	0	0	0	0	495.589.540	8.738.730	504.328.270	0	
5.1.02.01.01.00067													
2.15.01.2.01.01	Belanja Kebutuhan Pertanggungjawaban	49.817.400	0	0	0	0	0	0	4.180.400	4.180.400	49.817.400	0	
5.1.02.01.01.00068													
2.15.01.2.01.01	Belanja pembelian untuk kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	4.180.400	0	0	0	0	0	0	355.000	0	355.000	0	
5.1.02.01.01.00069													
2.15.01.2.01.01	Belanja pembelian untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputor	355.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000	0	
5.1.02.01.01.00070													
2.15.01.2.01.01	Belanja pembelian dan pengadaan barang	14.800.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.300.000	4.600.000	0	
5.1.02.01.01.00071													
2.15.01.2.01.01	Belanja pembelian untuk kegiatan Kantor, Monev, Penerimaan, dan Penilaian	11.500.000	0	0	0	0	0	0	23.830.800	2.310.000	26.140.800	0	
5.1.02.01.01.00072													
2.15.01.2.01.01	Belanja jasa tenaga intelektual dan teknis	28.200.800	0	0	0	0	0	0	385.000	385.000	28.585.800	0	
5.1.02.01.01.00073													
2.15.01.2.01.01	Belanja Lain-lain	1.128.000	0	0	0	0	0	0	6	0	1.134.000	0	
5.1.02.01.01.00074													
2.15.01.2.01.01	Belanja jasa tenaga intelektual dan teknis	1.128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.128.000	0	
5.1.02.01.01.00075													

KODE REKENING	URAIAN	Pagri APBD	SPJ LS Gaji			SPJ LS Barang dan Jasa			Belanja UPJ/OUTU			Jml. Belanja	Sisa DPA
			Sd. Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	Sd. Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini			
2.15.01.2.02.01. 5.1.01.05.1.1.0004	Belanja insentif bagi Eksekutif atau Manajerial Atas/Jasa Utama, Pelayanan Teknis & Tsp Jabat Uluhan	2.572.000	0	2.572.000	2.572.000	0	0	0	0	0	2.572.000	0	
2.15.01.2.02.01. 5.1.01.05.1.1.0005	Belanja insentif bagi Eksekutif atau Manajerial Bawah/Jasa Utama, Pelayanan Teknis & Tsp Bawah	28.400.840	0	18.144.181	15.360.781	0	0	0	0	0	16.310.781	6.048.059	
2.15.01.2.02.01. 5.1.01.05.1.1.0017	Belanja insentif bagi Eksekutif atau Manajerial Bawah/Jasa Utama, Pelayanan Teknis & Tsp Bawah	325.674	0	603.632	469.670	0	0	0	0	0	469.670	832.044	
2.15.01.2.02.01. 5.1.02.01.1.4.0004	Belanja insentif bagi Pegawai Non ASN atau Manajerial Bawah/Jasa Utama, Pelayanan Teknis & Tsp Bawah	4.845.141	0	4.296.148	4.296.748	0	0	0	0	0	4.296.748	118.002	
2.15.01.2.02.01. 5.1.02.01.1.4.0006	Belanja insentif bagi Pegawai Non ASN atau Manajerial Bawah/Jasa Utama, Pelayanan Teknis & Tsp Bawah	16.514.002	0	8.337.670	6.387.676	0	0	0	0	0	6.387.676	8.108.329	
2.15.01.2.02.01. 5.1.02.01.1.4.0017	Belanja insentif bagi Pegawai Non ASN atau Manajerial Bawah/Jasa Utama, Pelayanan Teknis & Tsp Bawah	2.482.300	0	418.154	476.556	0	0	0	0	0	476.556	1.985.758	
2.15.01.2.02.01. 5.1.02.01.1.4.0017	Belanja insentif bagi Pegawai Non ASN atau Manajerial Bawah/Jasa Utama, Pelayanan Teknis & Tsp Bawah	17.874.600	0	0	0	0	0	0	0	0	17.874.600	0	
2.15.01.2.02.01. 5.1.02.01.1.4.0017	Belanja insentif bagi Pegawai Non ASN atau Manajerial Bawah/Jasa Utama, Pelayanan Teknis & Tsp Bawah	8.941.688	0	0	0	0	0	0	0	0	8.941.688	0	
2.15.01.2.02.01. 5.1.02.01.1.4.0017	Belanja insentif bagi Pegawai Non ASN atau Manajerial Bawah/Jasa Utama, Pelayanan Teknis & Tsp Bawah	3.724.900	0	0	0	0	0	0	0	0	3.724.900	0	
2.15.01.2.02.01. 5.1.02.01.1.4.0017	Belanja insentif bagi Pegawai Non ASN atau Manajerial Bawah/Jasa Utama, Pelayanan Teknis & Tsp Bawah	5.111.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.111.000	0	
2.15.01.2.02.01. 5.1.02.01.1.4.0017	Belanja insentif bagi Pegawai Non ASN atau Manajerial Bawah/Jasa Utama, Pelayanan Teknis & Tsp Bawah	38.733.468	0	0	0	0	0	0	0	0	38.733.468	0	
2.15.01.2.02.01. 5.1.02.01.1.4.0017	Belanja insentif bagi Pegawai Non ASN atau Manajerial Bawah/Jasa Utama, Pelayanan Teknis & Tsp Bawah	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000	0	
2.15.01.2.02.01. 5.1.02.01.1.4.0017	Belanja insentif bagi Pegawai Non ASN atau Manajerial Bawah/Jasa Utama, Pelayanan Teknis & Tsp Bawah	28.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.200.000	0	
2.15.01.2.02.01. 5.1.02.01.1.4.0017	Belanja insentif bagi Pegawai Non ASN atau Manajerial Bawah/Jasa Utama, Pelayanan Teknis & Tsp Bawah	8.640.200	0	0	0	0	0	0	0	0	8.640.200	152.500	
2.15.01.2.02.01. 5.1.02.01.1.4.0017	Belanja insentif bagi Pegawai Non ASN atau Manajerial Bawah/Jasa Utama, Pelayanan Teknis & Tsp Bawah	1.128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.128.000	0	
2.15.01.2.02.01. 5.1.02.01.1.4.0017	Belanja insentif bagi Pegawai Non ASN atau Manajerial Bawah/Jasa Utama, Pelayanan Teknis & Tsp Bawah	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000	26.606	
2.15.01.2.02.01. 5.1.02.01.1.4.0017	Belanja insentif bagi Pegawai Non ASN atau Manajerial Bawah/Jasa Utama, Pelayanan Teknis & Tsp Bawah	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	84.000	77.599	
2.15.01.2.02.01. 5.1.02.01.1.4.0017	Belanja insentif bagi Pegawai Non ASN atau Manajerial Bawah/Jasa Utama, Pelayanan Teknis & Tsp Bawah	223.432.000	0	0	0	0	0	0	0	0	223.432.000	3.537.771	
2.15.01.2.02.01. 5.1.02.01.1.4.0017	Belanja insentif bagi Pegawai Non ASN atau Manajerial Bawah/Jasa Utama, Pelayanan Teknis & Tsp Bawah	223.432.000	0	0	0	0	0	0	0	0	223.432.000	3.537.771	

KODE REKENING	URAIAN	SPJ LS Gaji			SPJ LS Barang dan Jasa			Belanja UPGU/UTU			Jml. Belanja	Sisa DPA	
		Sd. Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	Sd. Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	Sd. Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini			
													Pagu APBD
2.15.01.2.06.07.	Belanja Karyawan untuk Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.01.01.0.1.0007.	Kantor dan/atau Pns	4.750.000										3.000.000	1.750.000
2.15.01.2.06.07.	Belanja Karyawan untuk Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.01.01.0.1.0006.	Kantor Bahan Komputar	52.120.000			51.481.000							51.481.000	639.000
2.15.01.2.06.08.	Penelitian dan Pengembangan	23.000.000			0							23.000.000	0
2.15.01.2.06.08.	Belanja Migrasi dan Riset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.01.01.0.1.0013.	Supai	10.000.000			9.900.000							9.900.000	10.000.000
2.15.01.2.06.08.	Belanja Migrasi dan Riset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.01.01.0.1.0013.	Jaminan Tetap	22.100.000			0							22.100.000	0
2.15.01.2.06.09.	Penyenggaraan Ruang	154.790.000			0							154.790.000	0
5.1.01.01.0.1.0014.	Konstruksi dan Renovasi: BPPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.01.2.06.09.	Belanja Pengiriman Barang Lain	8.875.000			0							8.875.000	0
5.1.01.01.0.1.0015.	Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.01.2.06.09.	Belanja Pengiriman Barang Lain	125.915.000			0							125.915.000	0
5.1.01.01.0.1.0015.	Masing Lain Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.01.2.06.09.	Belanja Pengiriman Barang Lain	64.317.000			63.423.458							63.423.458	793.542
5.1.01.01.0.1.0015.	Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.01.2.06.09.	Belanja Pengiriman Barang Lain	64.317.000			63.423.458							63.423.458	793.542
5.1.01.01.0.1.0015.	Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.01.2.06.09.	Belanja Pengiriman Barang Lain	54.111.000			53.480.079							53.480.079	630.921
5.1.01.01.0.1.0015.	Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.01.2.06.09.	Belanja Pengiriman Barang Lain	32.000.000			3.943.380							3.943.380	28.056.620
5.1.01.01.0.1.0015.	Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.01.2.06.09.	Belanja Pengiriman Barang Lain	34.375.751.104			33.504.336.117							33.504.336.117	871.415.000
5.1.01.01.0.1.0015.	Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.01.2.06.09.	Belanja Pengiriman Barang Lain	34.375.751.104			33.504.336.117							33.504.336.117	871.415.000
5.1.01.01.0.1.0015.	Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.01.2.06.09.	Belanja Pengiriman Barang Lain	55.000.000			0							0	55.000.000
5.1.01.01.0.1.0015.	Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.01.2.06.09.	Belanja Pengiriman Barang Lain	24.000.000			0							0	24.000.000
5.1.01.01.0.1.0015.	Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.01.2.06.09.	Belanja Pengiriman Barang Lain	34.298.711.104			32.304.385.117							32.304.385.117	1.994.326.000
5.1.01.01.0.1.0015.	Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.01.2.06.09.	Belanja Pengiriman Barang Lain	610.007.400			0							0	610.007.400
5.1.01.01.0.1.0015.	Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.01.2.06.09.	Belanja Pengiriman Barang Lain	114.340.000			0							0	114.340.000
5.1.01.01.0.1.0015.	Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.01.2.06.09.	Belanja Pengiriman Barang Lain	86.340.000			0							0	86.340.000
5.1.01.01.0.1.0015.	Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.01.2.06.09.	Belanja Pengiriman Barang Lain	25.000.000			0							0	25.000.000
5.1.01.01.0.1.0015.	Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.01.2.06.09.	Belanja Pengiriman Barang Lain	41.383.000			0							0	41.383.000
5.1.01.01.0.1.0015.	Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

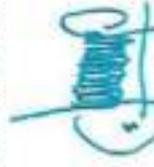
KODE REKENING	URAIAN	Pagu APBD	SPJ LS Gaji			SPJ LS Barang dan Jasa			Belanja UP/GURU			Jml. Belanja	Sisa DPA
			Sd. Bulan Laju	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	Sd. Bulan Laju	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	Sd. Bulan Laju	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini		
2.15.01.2.09.02 5.1.02.02.6.1.0067	Belanja Penyelenggaraan Hpk. Bks. dan Perumahan	41.335.000	0	0	0	0	0	0	3.874.500	3.874.500	16.408.200	16.408.200	25.186.800
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	424.822.405	0	0	0	0	0	0	37.239.070	37.239.070	419.573.819	419.573.819	5.248.486
2.15.01.2.09.09 5.1.02.01.0.1.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kebutuhan	7.146.000	0	0	0	0	0	0	7.246.800	7.246.800	7.246.800	7.246.800	0
2.15.01.2.09.09 5.1.02.01.0.1.0004	Belanja Bahan-Bahan Renta dan Perlumas	1.858.500	0	0	0	0	0	0	1.867.200	1.867.200	1.867.200	1.867.200	191.360
2.15.01.2.09.09 5.1.02.01.0.1.0005	Belanja Bahan-Bahan Baja	5.544.000	0	0	0	0	0	0	5.544.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000	0
2.15.01.2.09.09 5.1.02.01.0.1.0010	Belanja Bahan-bahan Takung Gars	1.871.000	0	0	0	0	0	0	814.500	814.500	814.500	814.500	1.156.500
2.15.01.2.09.09 5.1.02.01.0.1.0020	Belanja Aspal/Bitum dan Lapisan Keras/Aspal/Bitum Keras	69.713.750	0	0	0	0	0	0	69.713.750	69.713.750	69.713.750	69.713.750	0
2.15.01.2.09.09 5.1.02.01.0.1.0027	Belanja Obat-Obatan-Zat	3.451.825	0	0	0	0	0	0	3.652.825	3.652.825	3.652.825	3.652.825	0
2.15.01.2.09.09 5.1.02.01.0.2.0012	Belanja Pisu-Pisu Plastik PVC (PVC)	394.200	0	0	0	0	0	0	394.200	394.200	394.200	394.200	0
2.15.01.2.09.09 5.1.02.02.0.1.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi/Komputer	148.890.000	0	0	0	0	0	0	134.850.000	134.850.000	147.250.000	147.250.000	1.550.000
2.15.01.2.09.09 5.1.02.02.0.1.0033	Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan Teknisi	74.000.000	0	0	0	0	0	0	68.200.000	68.200.000	74.000.000	74.000.000	0
2.15.01.2.09.09 5.1.02.02.0.1.0036	Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan Teknisi	17.000.000	0	0	0	0	0	0	15.950.000	15.950.000	17.000.000	17.000.000	0
2.15.01.2.09.09 5.1.02.02.0.2.0025	Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan Teknisi	17.000.000	0	0	0	0	0	0	15.950.000	15.950.000	17.000.000	17.000.000	0
2.15.01.2.09.09 5.1.02.02.0.2.0036	Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan Teknisi	17.000.000	0	0	0	0	0	0	15.950.000	15.950.000	17.000.000	17.000.000	0
2.15.01.2.09.09 5.1.02.02.0.2.0037	Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan Teknisi	1.345.200	0	0	0	0	0	0	632.904	632.904	912.316	912.316	432.884
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.750.000	0	0	0	0	0	0	7.350.000	7.350.000	48.750.000	48.750.000	0
2.15.01.2.09.10 5.1.02.03.0.2.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Basmah Tunggal atau Basmah Perbaikan	15.250.000	0	0	0	0	0	0	1.830.000	1.830.000	15.250.000	15.250.000	0
2.15.01.2.09.10 5.1.02.03.0.2.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer/Periferal	34.500.000	0	0	0	0	0	0	5.520.000	5.520.000	34.500.000	34.500.000	0
J U M L A H		66.525.120.206.00	6.921.970.697.00	1.211.104.184.00	8.132.575.681.00	37.695.690.510.00	8.995.738.896.00	46.681.418.696.00	774.795.354.00	774.795.354.00	8.362.318.916.00	60.876.710.997.00	5.548.489.611.00
PENERIMAAN													
-SP2D		6.074.355.968.00	1.211.104.184.00	8.132.575.681.00	37.695.690.510.00	8.995.738.896.00	46.681.418.696.00	1.151.439.389.00	1.151.439.389.00	1.151.439.389.00	6.667.571.536.00	63.404.630.314.00	
-Penerimaan Pajak													
• PPN		0.00	0.00	0.00	841.833.217.00	376.971.327.00	1.416.803.544.00	130.756.145.00	14.580.423.00	14.580.423.00	125.376.564.00	1.542.179.108.00	

KODE REKENING	URAIAN	Pagu APBD	SPJ LS Gaji			SPJ LS Barang dan Jasa			Belanja UP/IGU/TU			Jml. Belanja	Sisa DPA
			Sd. Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	Sd. Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	Sd. Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini		
b. PPN-21			4.074.781,00	204.678.833,00	208.703.614,00	0,00	0,00	0,00	30.063.456,00	7.045.400,00	45.108.056,00	253.810.330,00	
c. PPN-22			0,00	0,00	84.110.960,00	2.272.590,00	46.393.587,00	29.567.720,00	20.070.542,00	3.497.138,00	29.567.720,00	75.961.887,00	
d. PPN-23			0,00	0,00	12.286.383,00	0,00	12.286.383,00	14.423.456,00	11.296.438,00	3.127.018,00	14.423.456,00	78.711.839,00	
e. PPN-28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f. PPN-Final			0,00	0,00	87.676.330,00	105.008.600,00	193.484.964,00	1.098.873,00	1.098.873,00	0,00	3.098.873,00	194.583.837,00	
- Lainnya			2.485.071,00	2.485.071,00	2.485.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.062.832,00	
Jumlah Perhitungan			6.559.852,00	1.415.733.210,00	1.422.293.061,00	9.538.703.850,00	48.276.388.064,00	5.862.407.630,00	1.230.286.777,00	6.092.694.416,00	63.509.309.318,00		
POGZULAIAN													
- SPJ			6.824.355.988,00	1.211.394.381,00	8.115.468.132,00	8.985.738.099,00	46.003.430.000,00	5.467.523.556,00	194.372.715,00	6.253.894.271,00	60.988.773.029,00		
- Penyisihan Pajak			0,00	0,00	0,00	571.971.327,80	1.415.807.544,00	130.796.143,00	130.796.143,00	14.580.421,00	125.376.564,00	1.542.179.158,00	
a. PPN			4.074.781,00	204.678.833,00	208.703.614,00	0,00	0,00	30.063.456,00	7.045.400,00	45.108.056,00	253.810.330,00		
b. PPN-21			0,00	0,00	84.110.960,00	2.272.590,00	46.393.587,00	20.070.542,00	3.497.138,00	29.567.720,00	75.961.887,00		
c. PPN-22			0,00	0,00	12.286.383,00	0,00	12.286.383,00	14.423.456,00	11.296.438,00	3.127.018,00	14.423.456,00		
d. PPN-23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e. PPN-28			0,00	0,00	87.676.330,00	105.008.600,00	193.484.964,00	1.098.873,00	1.098.873,00	0,00	3.098.873,00		
f. PPN-Final			2.485.071,00	2.485.071,00	2.485.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Lainnya			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jumlah Pengeluaran			6.930.933.820,00	1.415.733.013,00	8.346.646.826,00	9.568.701.609,00	48.276.388.064,00	5.854.847.003,00	1.232.827.808,00	6.092.574.416,00	63.509.309.318,00		
Saldo Kas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960.633,00	-7.960.633,00	0,00	0,00	0,00	

Mengetahui
Pengguna Anggaran


Drs. H. ASDULLAH, SA, MIM.
NIP. 19640203 199009 1 001

SUMBER, 31 Desember 2022
Bendahara Pengeluaran



SUMARTONO, SE.
NIP. 19770323 200801 1 007



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

**RENCANA AKSI KINERJA
TAHUN 2023**

**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023**

RENCANA ACEK KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

1. IDENTIFIKASI KEGIATAN DAN
 2. IDENTIFIKASI KEGIATAN DAN
 3. IDENTIFIKASI KEGIATAN DAN

No	Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	RENCANA ACEK KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022																			
			M1					M2														
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober										
1	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Berbasis Web	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Berbasis Web	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Berbasis Web	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Berbasis Web	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Berbasis Web	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Berbasis Web	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kepala Bidang Lintas Des Anggutan

[Signature]

EDDY SUSANTO, A. Ms. PhD., S.S.
 NIP. 19650901 199003 1 005

Ember, Januari 2022
 Kepala Seksi Pengujian Baruan
 Anali Kabupaten Ahri Muga

[Signature]
 DEYANITA, S.Sns
 NIP. 19740531 200706 1 003

RENCANA AKSI KINETIKA TAHUN ANGGARAN 2023

1. Kepala Biro Perencanaan
 2. Kepala Bidang Prasarana
 3. Kepala Bidang Penganggaran

No	Kategori	Kode	Uraian Kegiatan	Materi	SK I				SK II				SK III						
					Kegiatan		Materi		Kegiatan		Materi		Kegiatan		Materi				
					Januari	Februari	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember				
1	Strategis	101.01.01.001.001	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
				1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

Sumber, Januari 2023
 Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana

Kepala Bidang Prasarana



MUHAMMAD RAMALLUDIN, SH
 NIP. 19590304200604 1 003



H. ROCHMAT PRIYATIN, M.H
 NIP. 19660101200601 1 006

